



LKJIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

TAHUN 2023



Dinas Sosial

Pemerintah Kabupaten Mojokerto

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dibuat sekaligus sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang diemban Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja disusun sesuai dengan ketentuan dalam pedoman yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 069/138/416-034/2023 perihal Choaching Klinik LKjIP maka dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023.

Secara eksternal, Laporan Kinerja merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam rangka menuju terwujudnya *good governance*. Sedangkan secara internal, Laporan Kinerja merupakan salah satu alat evaluasi untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Kami ucapkan terima kasih kepada Tim LKjIP yang telah menyelesaikan penyusunan laporan ini. Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran perbaikan dari berbagai pihak terkait, sangat kami harapkan.

Mojokerto, Desember 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO


TRY RAHARJO MURDIANTO, S.STP, M.AP.

Pembina

NIP. 19870519 200602 1 002

Daftar isi

KATA PENGANTAR	ii
Daftar isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I	6
PENDAHULUAN.....	6
A. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL.....	6
B. TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL	11
C. ISU STRATEGIS.....	19
D. CASCADING KINERJA DINAS SOSIAL	24
E. PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL	34
F. RINGKASAN HASIL EVALUASI DINAS SOSIAL	45
BAB II	48
PERENCANAAN KINERJA.....	48
A. UMUM.....	48
B. ARAH KEBIJAKAN.....	50
C. PROGRAM UTAMA	51
D. STRATEGI	54
E. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	59
F. RENCANA STRATEGIS	66
G. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023	72
BAB III	74
AKUNTABILITAS KINERJA.....	74
1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	74
2. REALISASI ANGGARAN	92
BAB IV	135
P E N U T U P.....	135
A. KESIMPULAN.....	135
B. SARAN	136

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategik (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto merupakan suatu rencana jangka menengah Tahun 2021 – 2026 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial dan memuat 1 (Satu) pernyataan Visi, 1 (satu) pernyataan Misi yang diemban, serta 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai pada akhir Tahun 2023. Sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disusun untuk Tahun 2023 terdapat 6 (Enam) indikator kinerja program, 12 (Dua Belas) indikator kinerja kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) indikator kinerja sub kegiatan yang harus dicapai dan dilaksanakan, dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Tahun 2023 yang tersedia sebesar Rp. 19.922.809.277,- termasuk belanja pegawai.

Dari evaluasi kinerja secara mandiri (Self assesment) dari 1 sasaran yang ditetapkan seluruhnya dikategori berhasil mencapai target indikator kerja hampir 100%.

Dari 6 (Enam) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, ada beberapa kegiatan yang bisa kami tampilkan sebagai wujud dari pertanggung jawaban kegiatan di Tahun 2023 sebagai acuan untuk Tahun 2024 agar semakin lebih maksimal dalam meningkatkan perlindungan sosial pada penanganan Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta meningkatkan pelayanan kepada sasaran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Pencapaian Sasaran

Nilai Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dari 27 (Dua Puluh Tujuh) indikator sub kegiatan yang ada, 27 sudah mencapai target hampir 100%.

Rencana dan Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sebesar Rp 19.922.809.277,-. Dana yang terealisasi sebesar Rp. 19.031.280.757,- atau sebesar 95,53 %.

BAB I

PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto melakukan penilaian kinerja Tahun 2023. Penilaian kinerja ini dimulai dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator input (masukan) output (keluaran), outcome (hasil).

Indikator (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundangan yang berlaku. Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik atau non fisik. Indikator outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Selanjutnya dilakukan penilaian kinerja sesuai dengan instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang AKIP menggunakan piranti formulir Rencana Strategik (RS), RKT (Rencana Kinerja Tahunan), PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan), dan PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) sebagaimana diatur dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dari penilaian kinerja yang dilakukan didapatkan nilai – nilai yang meliputi Pengukuran Kinerja Kegiatan, pengukuran Pencapaian Sasaran.

Untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang lebih baik di masa mendatang diperlukan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, yang berisi Visi, Misi serta tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (Indikator) yang telah ditetapkan.

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Sosial dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Mojokerto yaitu “ **Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia** ”.

Dengan telaahan Visi sebagai berikut :

TERWUJUD	Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
MAJU	Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental - spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi
ADIL	Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sector
MAKMUR	Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin

Dan Misi Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan;**
2. **Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan;**
3. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan;**
4. **Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.**

Dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dinas Sosial yang mempunyai tugas pokok “ **melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial** ” dalam memperhatikan makna dan arti misi tersebut, maka dalam rangka mewujudkan Visinya ditetapkan Misi yang diemban Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

2. *Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan.*

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Laporan Kinerja Dinas Sosial ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan penyusunannya memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Oleh karena itu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan secara menyeluruh, efektif dan efisien, maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, faktual dan realistis.

Dalam mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto menetapkan Program Strategis yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Program Penanganan Bencana;
5. Program Rehabilitasi Sosial;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto selama Tahun Anggaran 2023, disusun Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi.

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tanggal 31 Januari 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan *good governance* dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang terukur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

2. Mendorong Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, LKjIP: Dinas Sosial Kabypaten Mojokerto,
5. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,
6. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan responsif sehingga dalam menjalankan tugas dan perannya dapat sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023.

B. TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto berlokasi di Jl. R.A Basuni No. 08 Mojokerto sebelumnya masih merupakan kantor yaitu Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Mojokerto seiring dengan paradigma baru yakni dengan berlakunya Undang – Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto. Sesuai Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, yang mana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial.

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang sosial;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial;
5. Pelaporan di bidang sosial; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi organik dengan tata kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 83 Tahun 2021.

Pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, dimana dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Guna mengantisipasi tantangan yang kita hadapi serta peluang yang dimiliki diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar tumbuhnya sikap dan tekad kemandirian bangsa yang menjadi tujuan untuk mewujudkan kondisi Kesejahteraan Sosial yang adil dan merata oleh dan untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang dalam konstelasi Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan sosial yang menangani 26 Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan 12 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), adapun susunan dari PPKS dan PSKS tersebut adalah sebagai berikut :

Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) terdiri dari :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan
7. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

16. Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Keluarga Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terdiri dari :

1. Pekerja Sosial Profesional (PSP)
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
5. Karang Taruna
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
7. Keluarga Pioner
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)
10. Penyuluh Sosial
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
12. Dunia Usaha

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas kedepannya mempunyai tantangan yang sangat berat, hal tersebut berkaitan dengan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat di Wilayah Kabupaten Mojokerto. Tantangan tersebut harus dijawab dengan hasil dari keterpaduan pembangunan pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dengan apa yang diinginkan masyarakat, setidaknya menjawab sebagian dari kebutuhan masyarakat, banyak permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat, tetapi secara garis besar dapat ditarik suatu pengelompokan besar permasalahan yaitu :

1. Belum terwujudnya *Good Governance* secara actual dan factual terasa sampai dengan masyarakat melalui *Good Public Governance*;
2. Masih belum meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Dengan dua kelompok besar permasalahan tersebut Dinas Sosial dituntut untuk dapat mengkoordinasikan program yang dijalankan oleh setiap Perangkat Daerah (PD) selama 5 (lima) Tahun kedepan agar sinkron terhadap program pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten Mojokerto, hal tersebut tidaklah mudah walaupun sudah ditunjang dengan berbagai peraturan yang mendasari agar tercipta perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan konsisten, hal tersebut dikarenakan masih kurangnya koordinasi yang dilaksanakan, masih lemahnya data base yang dimiliki dan masih belum maksimalnya Sumber Daya manusia (SDM) Dinas Sosial dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi dan perkiraan kedepan yang masih lemah, Dinas Sosial seharusnya dapat menjadi organisasi yang dapat mengantisipasi atau memprediksi kemungkinan yang akan terjadi adanya perkembangan pembangunan kedepan secara komprehensif setidaknya setahun kedepan, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan data-data yang akurat dan hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat tersedia estimasi pembangunan tahun berikutnya secara akurat.

Dengan dukungan tenaga yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang berjumlah 36 orang ASN terdiri dari 25 orang laki-laki dan 11 perempuan. Mayoritas ASN beragama Islam yaitu sebesar 100 %. Berdasarkan tingkat pendidikan, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto memiliki SDM yang cukup baik, sejumlah 12 orang ASN berpendidikan Pasca Sarjana, Sarjana

sejumlah 14 orang, Diploma sejumlah 1 orang, sedangkan 9 orang ASN berpendidikan SLTA. Berdasarkan perhitungan jumlah kebutuhan ASN Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, kondisi ideal untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebesar 36 Pegawai, sehingga diperlukan dukungan SDM yang memadai pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Komposisi karyawan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan berdasarkan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

TABEL I
Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial
Kabupaten Mojokerto



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
 DAFTAR PEGAWAI MENURUT JABATAN DAN GOLONGAN
 DINAS SOSIAL

Jabatan Nama	Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Struktural									
ESELON I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESELON II	0	0	1	0	0	0	0	0	1
ESELON III	0	0	0	0	4	1	0	0	5
ESELON IV	0	0	0	0	0	0	7	6	13
ESELON V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Staf									
Staf	0	0	0	0	0	0	13	4	17
Struktural									
	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Fungsional									
PERENCANA AHLI MUDA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA	0	0	0	0	0	0	3	4	7
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA	0	0	0	0	0	0	2	0	2
TOTAL	0	0	1	0	4	1	20	10	36

Sumber Data : Dinas Sosial



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
RINCIAN PEGAWAI MENURUT JABATAN
DINAS SOSIAL

No.	Unit Kerja	Jabatan		
		Struktural	Staff	Fungsional
1	DINAS SOSIAL	1	0	0
2	SEKRETARIAT	2	5	2
3	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	2	3
4	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	1	4	2
5	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	4	2
6	BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	1	1	2
7	UPTD PESANGGRAHAN PMKS MOJOPAHIT	1	1	0
TOTAL		8	17	11

Sumber Data : Dinas Sosial



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
RINCIAN PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN
DINAS SOSIAL

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	DINAS SOSIAL	1	0	1
2	SEKRETARIAT	6	3	9
3	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5	1	6
4	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	5	2	7
5	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	5	2	7
6	BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	2	2	4
7	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	5	6	11
8	UPTD PESANGGRAHAN PMKS MOJOPAHIT DINAS SOSIAL	1	1	2
TOTAL		25	11	36

Sumber Data : Dinas Sosial



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
RINCIAN PEGAWAI MENURUT UMUR DAN GOLONGAN
DINAS SOSIAL

No.	Unit Kerja	Golongan								Jumlah
		I		II		III		IV		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	<25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	25-35	0	0	0	0	0	1	1	0	2
3	36-45	0	0	1	1	0	1	0	1	4
4	46-55	0	0	5	1	6	4	2	1	19
5	>55	0	0	0	0	3	1	7	0	11
TOTAL		0	0	6	2	9	7	10	2	36

Sumber Data : Dinas Sosial

Disamping itu dukungan optimal obyek kegiatan dan terjalannya kerja sama yang sinergis antara Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan seluruh Dinas / Badan / Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto serta lembaga sosial masyarakat juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, namun demikian masih banyak kendala dan tantangan yang dapat menyebabkan kinerja Dinas Sosial belum dapat berjalan optimal seperti yang terancang dalam perencanaan strategik dari analisa SWOT dapat diuraikan beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Kelemahan - kelemahan tersebut antara lain :

- 1) Kuantitas sumber daya manusia yang terbatas
- 2) Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai
- 3) Kurangnya sumber daya manusia yang memadai
- 4) Kurangnya dukungan sarana transportasi yang memadai

C. ISU STRATEGIS

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto merumuskan isu strategis yang penting dalam perencanaan berkelanjutan adalah sebagai berikut :



The infographic features the title "ISU-ISU STRATEGIS" in large blue letters. It includes two photographs: the left one shows a person in a wheelchair being assisted by others, and the right one shows a group of people receiving red bags of aid. Logos for the local government and social services are in the top left, and the "Mojokerto" logo is in the top right.

1. **Kemiskinan Ekstrem**
2. **Perlindungan Sosial**

**Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
Dari Masing-masing Sub Urusan**

NO	ISU-ISU STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN YANG MENJADI SOLUSI	INOVASI
1	2	3	4
1	Kemiskinan Ekstrem.	<p>Program : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub. Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. <p>Program : Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <p>Sub. Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Permakanan. 2. Penyediaan Alat Bantu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) BULIK SOIMAH 2) GERBANG KESOS

		<p>Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</p> <p>Sub. Kegiatan : 1. Penyediaan Permakanan. 2. Penyediaan Sandang.</p> <p>Program : Program Penanganan Bencana</p> <p>Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</p> <p>Sub. Kegiatan : 1. Penyediaan Makanan.</p>	
2.	Perlindungan Sosial	<p>Program : Program Penanganan Bencana</p> <p>Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Sub. Kegiatan : 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.</p> <p>Program : Pemberdayaan Sosial</p>	

		<p>Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub. Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. <p>Program : Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <p>Sub. Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti. 2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial. 3. Pemberian Layanan Kedaruratan. 	
--	--	---	--

Adapun inovasi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut :

INOVASI



D. CASCADING KINERJA DINAS SOSIAL

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sesuai dengan Misi Kedua Bupati Mojokerto yaitu : ***Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan***, maka Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah Sistem Perlindungan Sosial dalam Penanganan PPKS, dengan indikator tujuan Persentase Penurunan Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sasaran (IKI) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan indikator sasarannya adalah Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan 5 (lima) indikator kinerja program (IKU), yaitu :

1. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
3. Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial.
4. Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial.
5. Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola.

Cascading penyajian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah sebagai berikut ini.

Tabel 1.1 Cascading Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

CASCADING DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO				
TUJUAN PD (SASARAN PEMDA)				
Sistem Perlindungan Sosial dalam Penanganan PPKS				
INDIKATOR TUJUAN				
Persentase Penurunan Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)				
SASARAN				
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)				
INDIKATOR SASARAN				
Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar				
KLA	KKS	SPM	SDG's	LPPD
1. PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. REHABILITASI SOSIAL	1. PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. PEMBERDAYAAN SOSIAL
2. PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2. PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2. PENANGANAN BENCANA	2. PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2. PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
3. REHABILITASI SOSIAL			3. REHABILITASI SOSIAL	3. REHABILITASI SOSIAL
			4. PENANGANAN BENCANA	4. PENANGANAN BENCANA

PROGRAM (KINERJA ESELON II)				
PEMBERDAYAAN SOSIAL	PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PENANGANAN BENCANA	REHABILITASI SOSIAL
INDIKATOR PROGRAM				
Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial
KEGIATAN (KINERJA ESELON III)				
1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1. Pemeeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
			2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

INDIKATOR KEGIATAN				
1. Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi	1. Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	1. Jumlah data fakir miskin yang dikelola	1. Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi
			2. Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	2. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi
SUB. KEGIATAN				
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Makanan	1. Penyediaan Permakanan

<p>2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</p>		<p>2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</p> <p>3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</p>	<p>1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</p>	<p>2. Penyediaan Alat Bantu</p> <p>3. Pemberian Layanan Kedaruratan</p> <p>1. Penyediaan Permakanan</p> <p>2. Penyediaan Sandang</p> <p>3. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti, Spiritual, dan Sosial</p>
--	--	---	--	---

				4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
INDIKATOR SUB. KEGIATAN				
1. Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota 2. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	1. Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	1. Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota 2. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota Masyarakat	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota 2. Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota

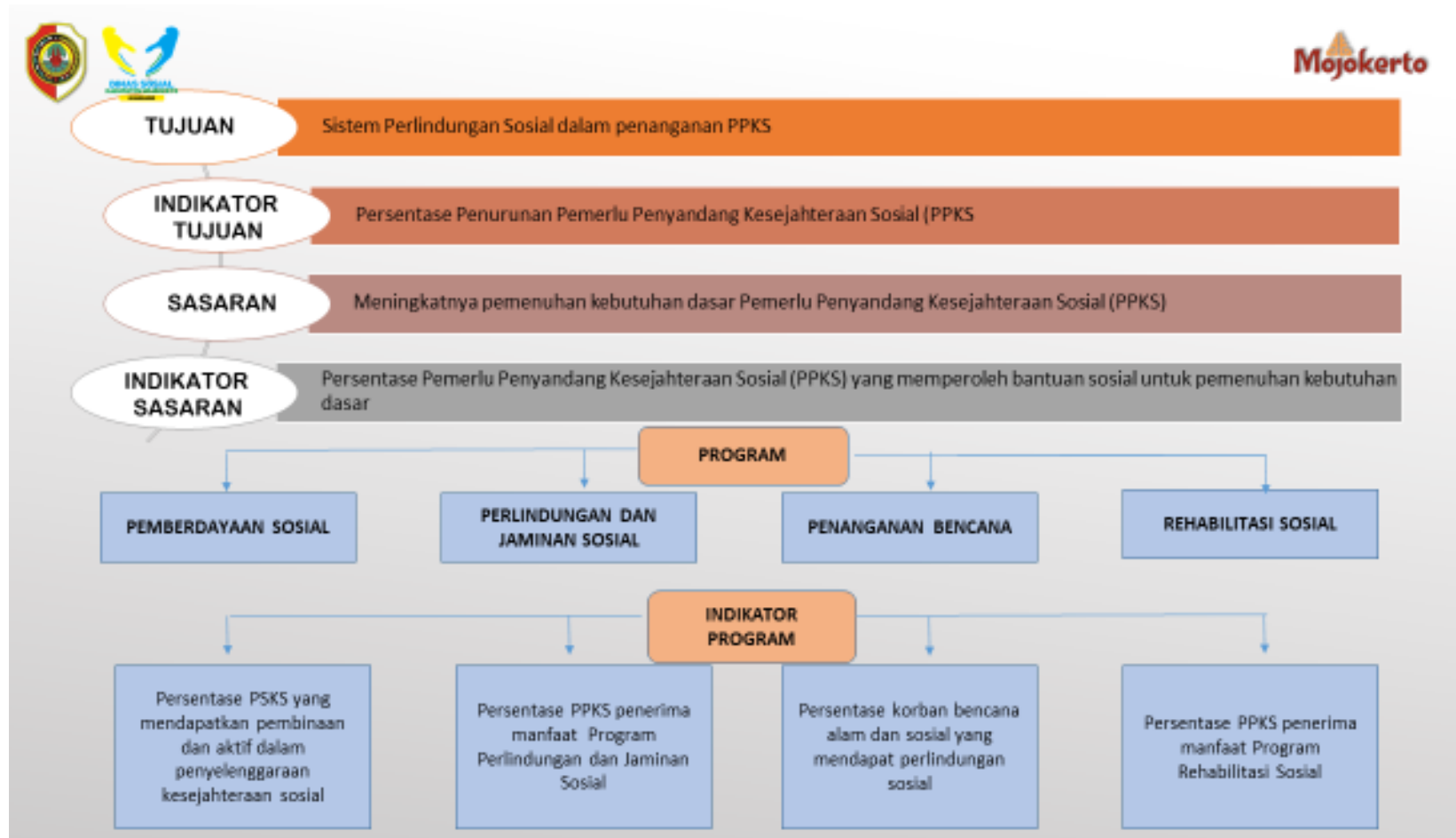
<p>3. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota</p>		<p>3. Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota</p>		<p>3. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>
			<p>1. Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota</p>	<p>1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota</p> <p>2. Jumlah Orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten / Kota</p> <p>3. Jumlah Orang yang mendapatkan pemenuhan perbekalan kesehatan di luar panti kewenangan kabupaten/kota</p>

				4. Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota
--	--	--	--	---

Gambar 1.1 Logical Framework Dinas Sosial

Logical Framework Misi Ke-2

Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan



Gambar 1.2 Pohon Kinerja Dinas Sosial



E. PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan sebuah peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No.19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan tersebut, Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Adapun tujuan dari penyusunan peta Probis adalah :

1. Agar setiap instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien.
2. Memudahkan komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.
3. Agar instansi pemerintah terkait memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Sedangkan manfaat dari penyusunan peta Probis yaitu :

1. Mempermudah dalam melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah.
2. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan instansi dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi

kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.

Berikut gambaran peta proses bisnis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto :

Tabel 1.2 Peta Proses Bisnis Dinas Sosial

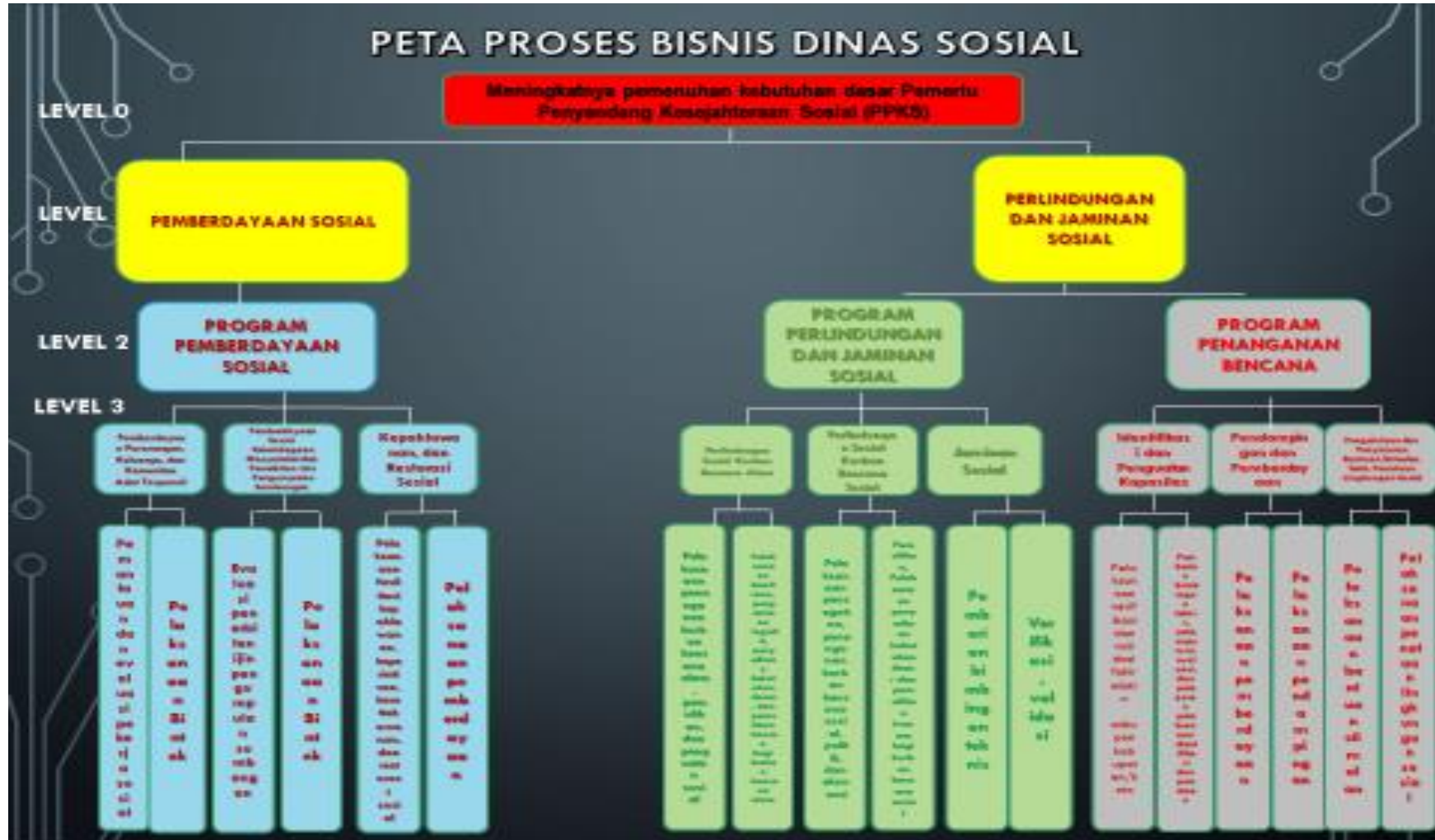
Level 0	Level 1	Level 2	PD Pengampu
P.4 Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan	P.4.1 Meningkatkan penyerapan dan kualitas tenaga kerja		Dinas Tenaga Kerja
	4.4.2 Mewujudkan desa mandiri		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	P.4.3 Meningkatkan Kualitas kemandirian PPKS		Dinas Sosial
	P.4.4 Optimalisasi pengendalian penduduk		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

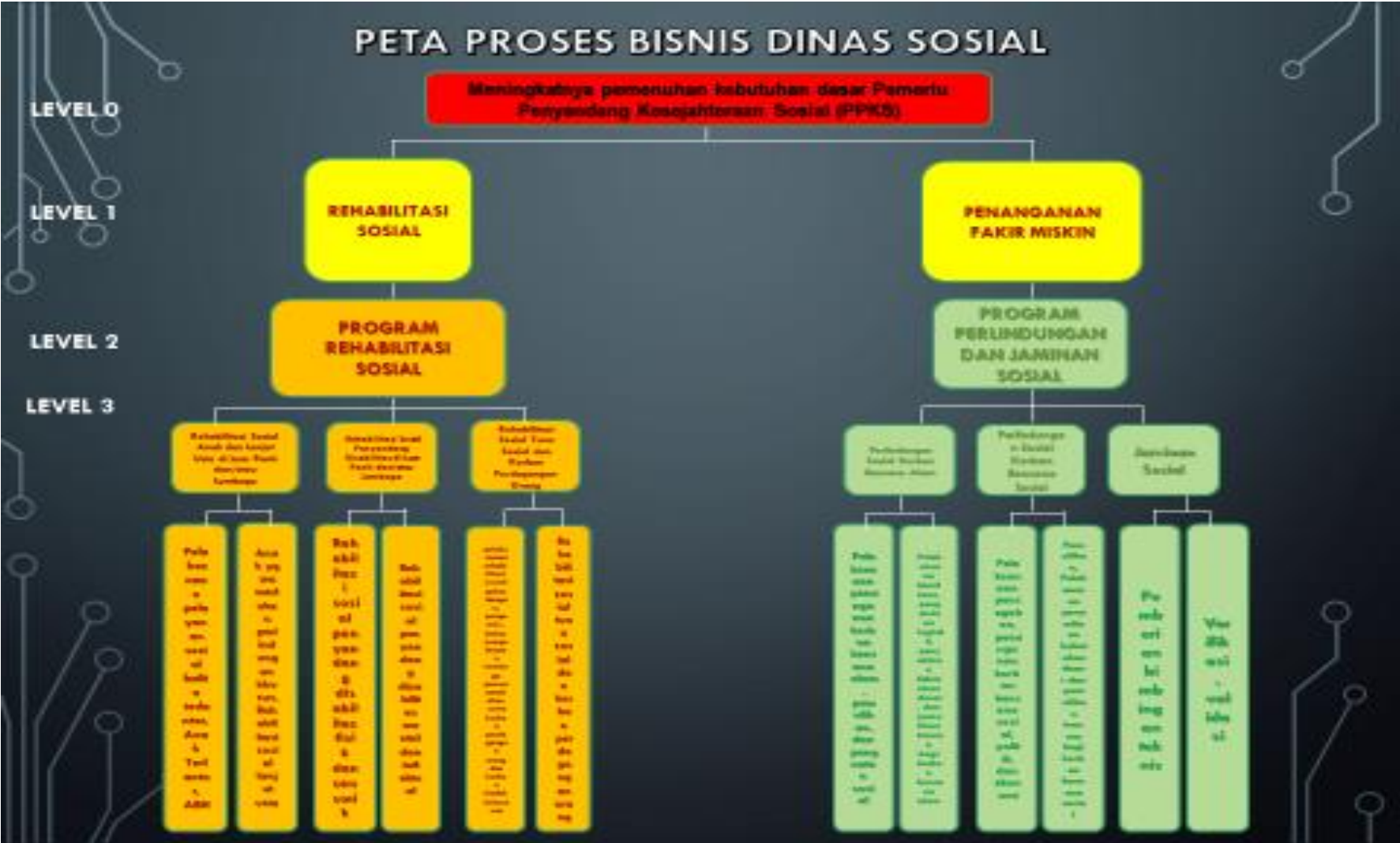
Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Pengampu
P.4	Memperecepat Penurunan Angka Kemiskinan	P.4.3	Meningkatkan Kualitas kemandirian PPKS	P.4.3.1	Optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	P.4.3.1	Mengoptimalkan peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	P.4.3.1.1	Melakukan pembinaan terkait peningkatan kemampuan bagi PSKS	P.4.3.1.1.1	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial	P.4.3.1.1.1.1	Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Sosial	P.4.3.1.1.1.1.1	Memberikan pembinaan dan fasilitasi bagi PSKS	Bidang Pemberdayaan Sosial
						P.4.3.2	Mengoptimalkan peran serta OPD dalam Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota bagi penerima manfaat	P.4.3.1.1.2	Melakukan verifikasi dan validasi data	P.4.3.1.1.2	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota di kabupa	P.4.3.1.1.2.2	Sosialisasi, Penyusunan dan verifikasi data dan data PPKS - PSKS serta pemberian layanan dan pendampingan	P.4.3.1.1.2.2.2	Terselesaikan data verifikasi data PMKS - PSKS	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

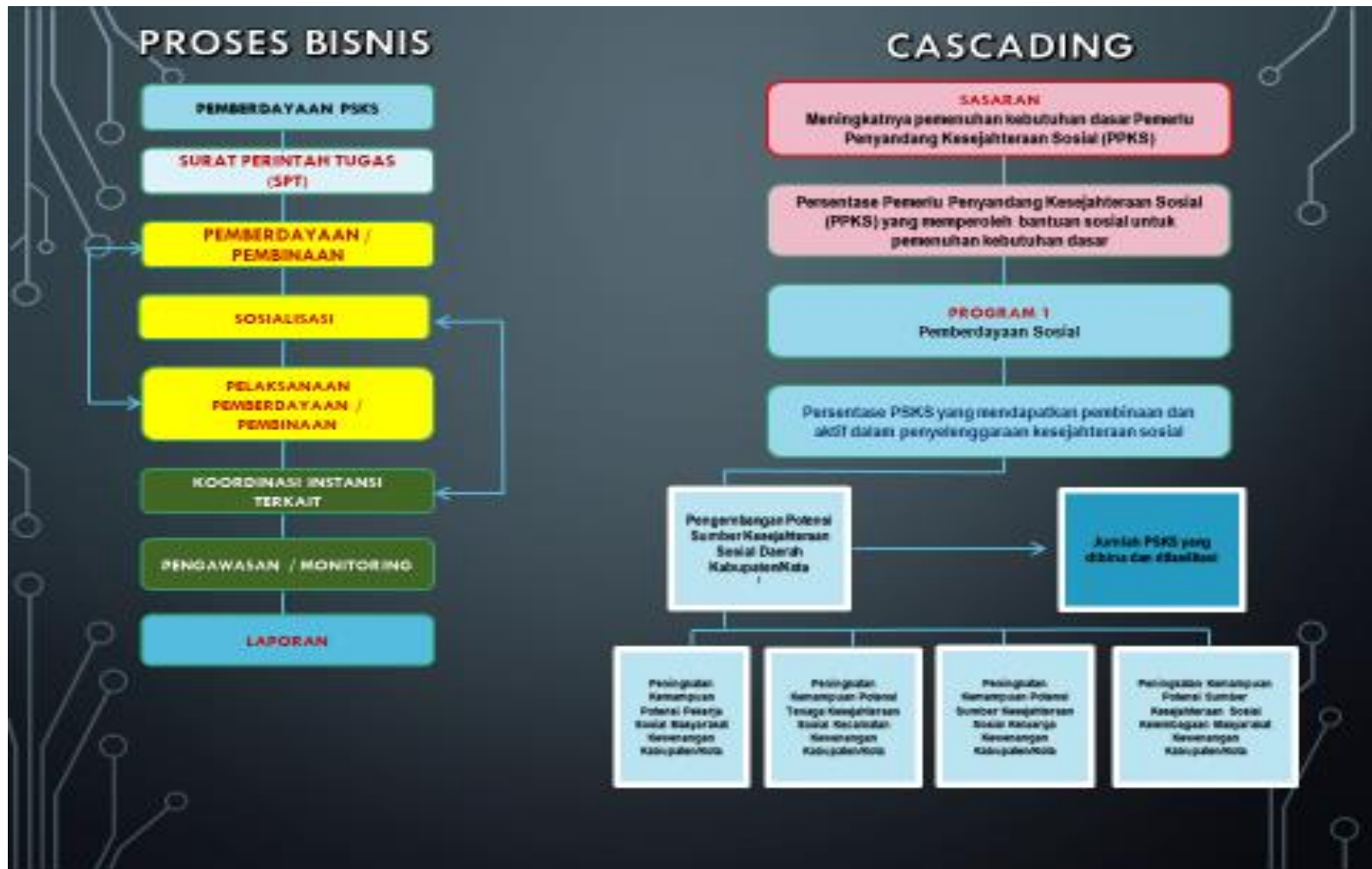
						t Progra m Perlind ungan dan Jamina n Sosial			ten mojoker to						
						P.4. 3.1. 3 Mengop timalka n peran TAGAN A dalam penang anan korban bencan a alam dan sosial yang mendap at perlind ungan sosial	P.4.3 .1.1. 3	Melak ukan pemi naan dan pembe rdayaa n terkait pening katan kema mpua n bagi TAGA NA	P.4.3. 1.1.1. 3	Monitor ing dan Evaluas i pelaksa naan kebijak an terkait penang anan korban bencan a alam dan sosial	P.4.3.1 .1.1.1. 3	Imple menta si kegiat an penan ganan benca na	P.4.3.1. 1.1.1.1. 3	Pelap oran hasil pena ngan an benca na alam dan sosial	Bidang Penan ganan Benca na

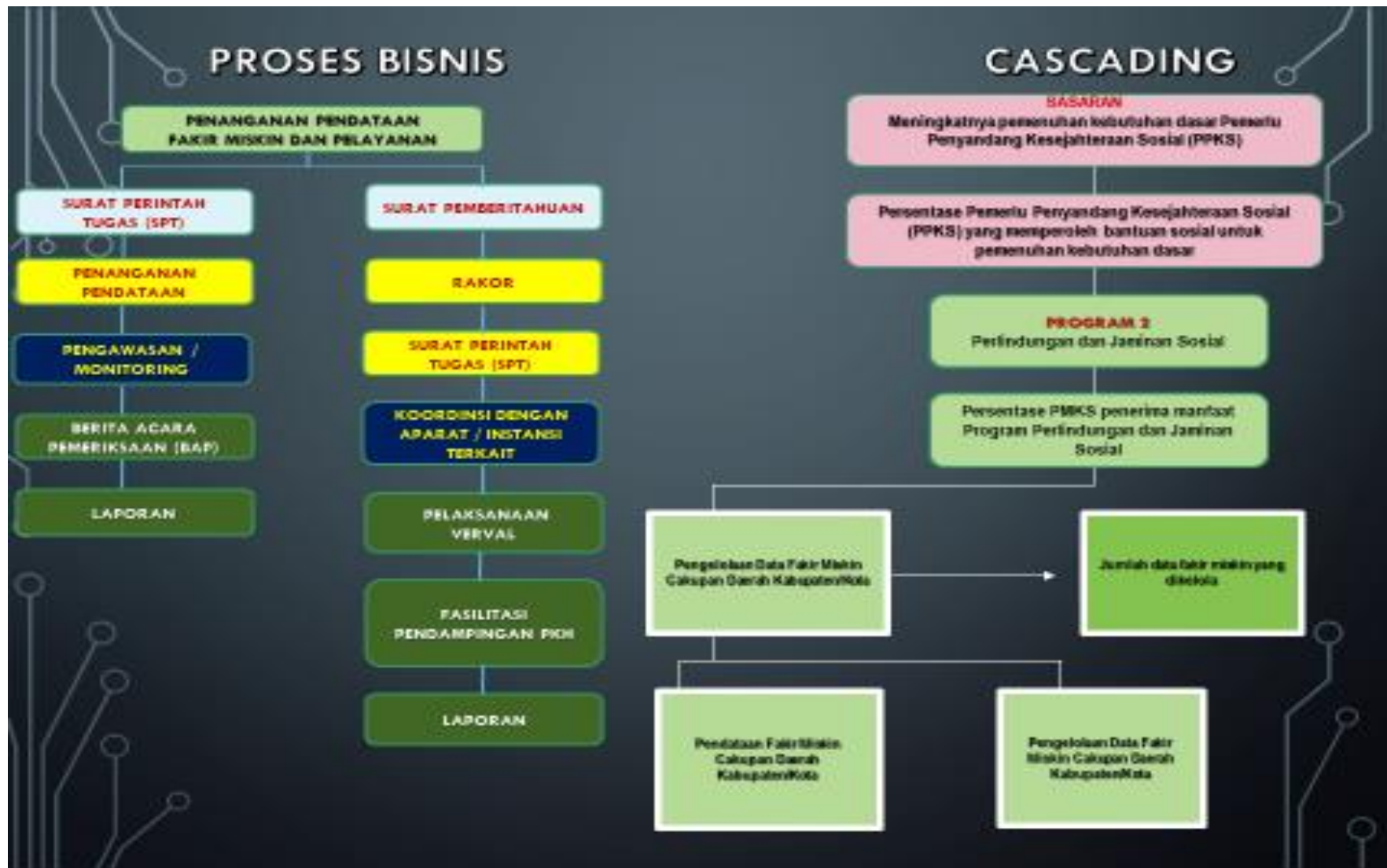
						P.4.3.1.4	Mengoptimalkan peran serta OPD dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	P.4.3.1.1.4	Melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pemberian bantuan bagi penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	P.4.3.1.1.1.4	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial	P.4.3.1.1.1.1.4	Pemberian layanan dan pendampingan paripurna (laporan pengan, psikolog, sampaiproses persidangan pada anak korban kekerasan), serta penanganan PPKS	P.4.3.1.1.1.1.1.4	Pelaporan hasil penanganan PPKS	Bidang Rehabilitasi Sosial
--	--	--	--	--	--	-----------	---	-------------	---	---------------	--	-----------------	---	-------------------	---------------------------------	----------------------------

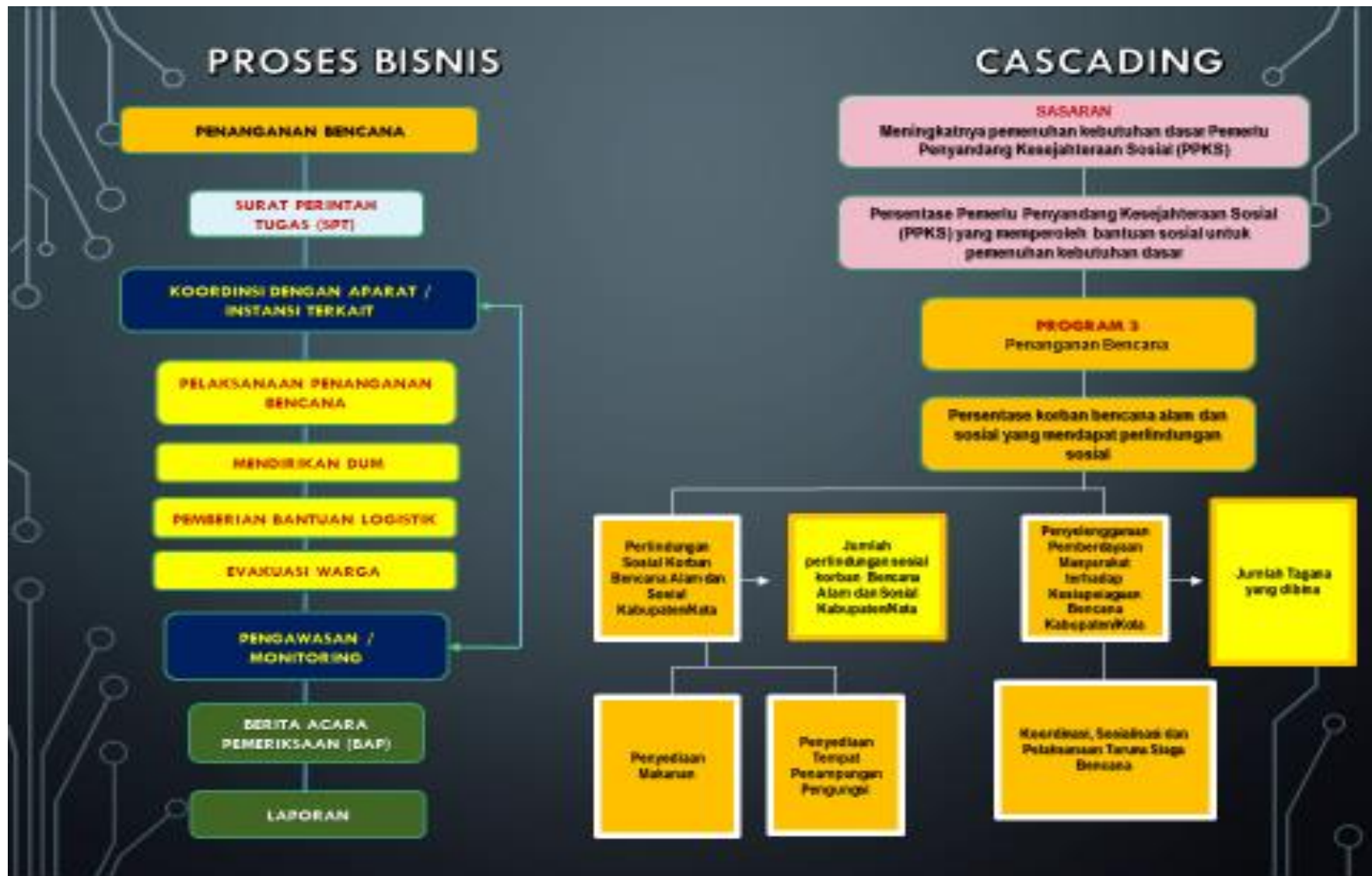
Gambar 1.3 Gambaran Proses Bisnis Pencapaian Misi 2 Dinas Sosial

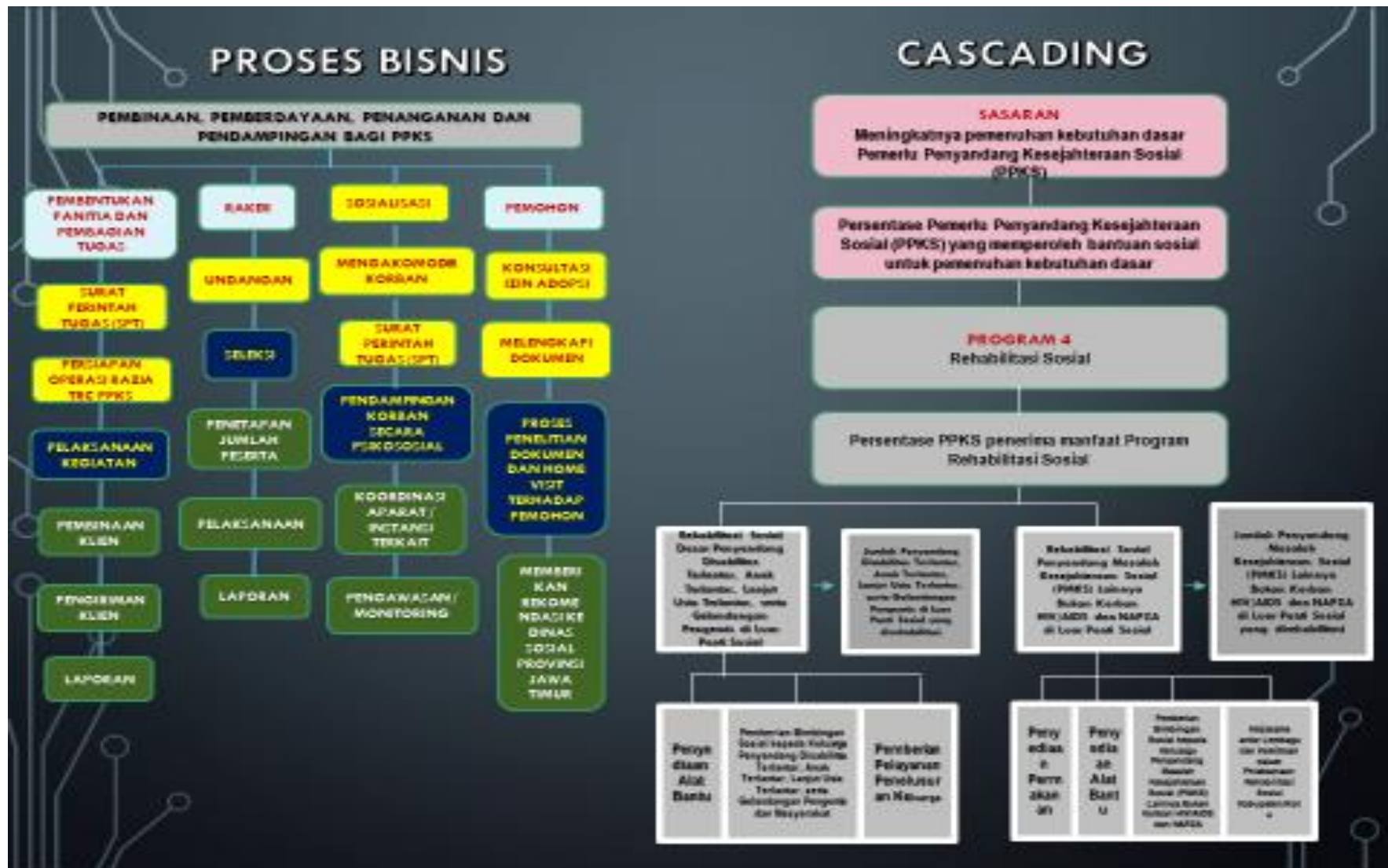






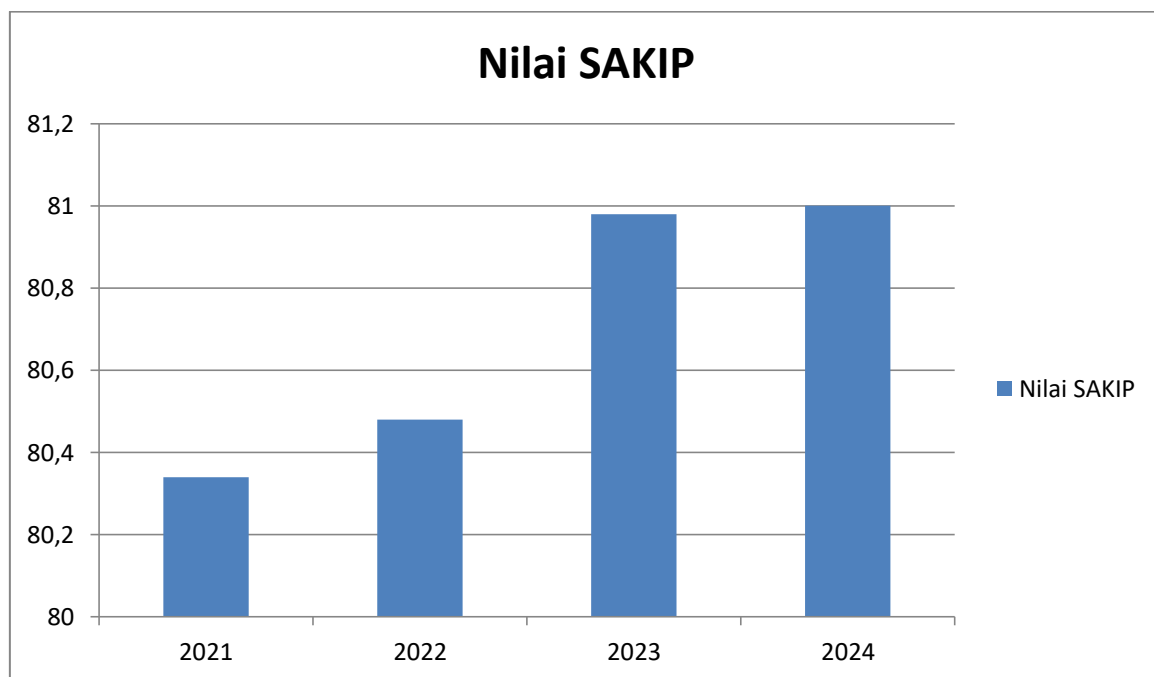






F. RINGKASAN HASIL EVALUASI DINAS SOSIAL

Berdasarkan hasil evaluasi APIP terhadap sistem akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Tahun 2023, Dinas Sosial mendapatkan nilai 80,98. Apabila dibandingkan Tahun 2021-2022 mengalami peningkatan. Sebagaimana gambaran capaian nilai evaluasi SAKIP Dinas Sosial Tahun 2021-2023 berikut ini :



Gambar 1.5. Nilai SAKIP Tahun 2021-2023

Dalam evaluasi SAKIP, juga dilaksanakan evaluasi terhadap penyusunan dokumen Laporan Kinerja. Berikut rekomendasi APIP hasil evaluasi terhadap SAKIP dan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 :

Tabel 1.3 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP dan LKJIP Dinas Sosial Tahun 2023.

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Waktu Rekomendasi terselesaikan
1	2	3	4
1	Melakukan reviu internal atas dokumen perencanaan untuk memastikan kesesuaian dan keselarasan indikator kinerja dan target kinerja antar dokumen perencanaan	Melakukan reviu dokumen perencanaan terhadap indicator kinerja dan target kinerja	31 Desember 2023
2	Memastikan penetapan target kinerja yang ditetapkan didasarkan pada capaian tahun sebelumnya dan perhitungan yang logis sebagai upaya adanya perbaikan kinerja	Penetapan Target Kinerja sudah didasarkan pada capaian Tahun sebelumnya	31 Desember 2023
3	Memastikan seluruh pegawai untuk menetapkan perencanaan kinerja berupa pembuatan SKP yang ditandatangani/disahkan oleh atasan langsung	SKP yang sudah ditandatangani	31 Desember 2023
4	Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas RATL (Rencana Aksi Tindak Lanjut) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan	Evaluasi dan monitoring kinerja pencapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 (per triwulan)	31 Desember 2023
5	Menyusun SOP perbaikan data jika terjadi kesalahan data dan memastikan jalannya SOP	SOP Perbaikan Data	31 Desember 2023
6	Memastikan pembuatan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tidak tahunan melainkan per triwulan dan memuat;		
	a) Hasil kinerja yang telah/seharusnya dicapai terutama pada ketercapaian target sasaran strategis	Evaluasi dan monitoring kinerja pencapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 (per triwulan)	31 Desember 2023

	b)	Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya serta belum ada analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya	Capaian kinerja dan anggaran (Efisiensi)	31 Desember 2023
	c)	Penyebab penghambat/pendukung dan upaya perbaikan kedepannya	Evaluasi dan monitoring kinerja pencapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 (per triwulan)	31 Desember 2023
	d)	Sasaran strategis berupa meningkatkan tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta optimalnya pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Pengembangan Inovasi SANG PATIH KESOS	31 Desember 2023
	e)	Realisasi kinerja tahun ini dengan strandar nasional	Evaluasi dan monitoring kinerja pencapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 (per triwulan)	31 Desember 2023
	f)	Analisis besaran efisiensi diperoleh dari perbaikan kegiatan/aktivitas atau dari pengurangan rincian aktivitas/biaya	Pengembangan Inovasi SANG PATIH KESOS	31 Desember 2023
7		Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial akan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output kinerja Perangkat Daerah	31 Desember 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. UMUM

Dalam kedudukannya sebagai unsur bidang kesejahteraan sosial serta dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dapat memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto telah menetapkan visi dan misinya dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Perencanaan Strategik Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026.

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Sosial dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Mojokerto yaitu :

“ Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ”

Setiap instansi pemerintah harus memastikan agar visi masa depan sesuai dan selaras dengan perubahan yang dilakukan, sehingga organisasi akan dapat efektif dan efisien dalam pencapaian Misi.

Visi dan Misi akan mendorong alokasi sumber daya diseluruh unsur organisasi sehingga kedua ungkapan Visi dan Misi tersebut akan selaras dengan tugas yang diembannya. Untuk mewujudkannya Visi yang ditetapkan, setiap instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai sehingga pernyataan Misi akan membawa organisasi kepada suatu fokus yang menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Dengan adanya Misi akan diketahui apa yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dengan baik, Misi yang diharapkan juga akan dapat menunjukkan peran dan program-program instansi pemerintah kepada seluruh jajaran organisasi serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam memperhatikan makna dan arti misi tersebut, maka dalam rangka mewujudkan Visinya ditetapkan Misi yang diemban Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan.

Misi tersebut ditetapkan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan tetap berdasarkan pada siklus manajemen. Tahapan dimulai dengan perencanaan kebutuhan instansi bersangkutan. Analisis kebutuhan instansi ini merupakan langkah yang sangat menentukan dalam menyusun program sesuai unit kerja maupun aparatur yang bersangkutan. Melalui analisis kebutuhan instansi ini pula dapat diketahui masalah yang dihadapi, prioritas masalah yang segera memerlukan pemecahan, alternatif pemecahan masalah dan seleksi alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah.

Melalui tahapan ini pula dapat ditetapkan jenis kegiatan yang dibutuhkan, sesuai dengan tuntutan kompetisi dan bidang tugas unit kerja atau instansi yang bersangkutan.

Tahapan kedua dalam perencanaan adalah perencanaan sistem kegiatan yang merupakan usaha-usaha sistematis untuk menganalisis masalah, mengidentifikasi, merancang dan menilai pemecahannya. Usaha tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan desain sistem kegiatan yang komplit, terarah, disengaja dan terkontrol untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tahapan ketiga adalah pelaksanaan atau penyelenggaraan kegiatan. Tahapan ini merupakan aplikasi dari rencana program yang telah disusun sebelumnya melalui analisis kebutuhan kegiatan dan perencanaan.

Tahap akhir dari kegiatan adalah evaluasi, baik evaluasi pada perencanaan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan Misi 2 ” ***Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan*** ” maka ditetapkan tujuan : Sistem Perlindungan Sosial dalam Penanganan PPKS.

B. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir Tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka mewujudkan tujuan “ **Sistem Perlindungan Sosial dalam Penanganan PPKS** ” maka ditetapkan sasaran :

- a. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan kebijakan *indikator sasaran* :

- Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam rangka mewujudkan indikator sasaran, maka ditetapkan *Indikator Kinerja Utama Program* dengan kebijakan :

- Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial; dan
- Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial.
- Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola.

C. PROGRAM UTAMA

Program adalah kumpulan kegiatan dan sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah guna mencapai sasaran yang ditetapkan. Program operasional pada dasarnya merupakan langkah implemementasi kebijaksanaan dan penjabaran secara terinci langkah – langkah yang akan dilaksanakan dalam waktu sampai dengan 5 tahun mendatang. Berdasarkan kebijaksanaan organisasi yang telah ditetapkan Dinas Sosial merumuskan program operasional sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan *Misi* tersebut, dirumuskan program-program :
 - a. Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan dan sub kegiatan indikatif :

Kegiatan :

- a.1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Sub. Kegiatan :

- a.1.1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
- a.1.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- a.1.3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

- b. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan dan sub kegiatan indikatif :

Kegiatan :

- b.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;

Sub. Kegiatan :

- b.1.1. Penyediaan Permakanan;
b.1.2. Penyediaan Alat Bantu;
b.1.3. Pemberian Layanan Kedaruratan.

Kegiatan :

- b.2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Sub. Kegiatan :

- b.2.1. Penyediaan Permakanan;
b.2.2. Penyediaan Sandang;
b.2.3. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti;
b.2.4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.

- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan dan sub kegiatan indikatif :

Kegiatan :

- c.1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub. Kegiatan :

- c.1.1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

- c.1.2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
- c.1.3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

d. Program Penanganan Bencana, dengan kegiatan dan sub kegiatan indikatif :

Kegiatan :

d.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;

Sub. Kegiatan :

d.1.1. Penyediaan Makanan;

Kegiatan :

d.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Sub. Kegiatan :

d.2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan kegiatan dan sub kegiatan indikatif :

Kegiatan :

e.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota.

Sub. Kegiatan :

e.1.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota.

D. STRATEGI

Strategi pembangunan Sosial dalam mempercepat tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
 - Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi.

2. Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Jumlah data fakir miskin yang dikelola.

3. Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial
 - Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;
 - Jumlah Tagana yang dibina.

4. Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial
 - Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi;
 - Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi.

5. Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola
 - Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota.

Strategi pembangunan Sosial dalam mempercepat tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Dinas Sosial

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Sistem Perlindungan Sosial dalam Penanganan PPKS		Persentase Penurunan Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
			1. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
			2. Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			3. Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial
			4. Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial
		5. Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	

No	Sasaran	Pencapaian	
		Tercapai	Tidak Tercapai
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	√	

Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tahun 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023**

- VISI** : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- MISI** : Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
- TUJUAN** : Sistem Perlindungan Sosial dalam Penanganan PPKS
- TUGAS** : Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Sosial
- FUNGSI** :
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	<p style="text-align: center;">Jumlah penerima bantuan sosial & Layanan sosial</p> $\frac{\text{-----}}{\text{DTKS}} \times 100$	DTKS	DINAS SOSIAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun n	LHE SAKIP	DINAS SOSIAL
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Keuangan	
	Indeks Profesionalitas ASN	IP ASN	BPKPSDM	
Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah Inovasi	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakannya strategi yang tepat. Strategi yang dibangun ini dilandasi informasi dan data yang relevan dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

1) Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan dan Sub. Kegiatan indikatif dari program ini meliputi :

Kegiatan :

1.1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Sub. Kegiatan :

1.1.1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;

1.1.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;

1.1.3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

2) Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan dan Sub. Kegiatan indikatif dari program ini meliputi :

Kegiatan :

2.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;

Sub. Kegiatan :

2.1.1. Penyediaan Permakanan;

2.1.2. Penyediaan Alat Bantu;

2.1.3. Pemberian Layanan Kedaruratan.

Kegiatan :

2.2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Sub. Kegiatan :

2.2.1. Penyediaan Permakanan;

2.2.2. Penyediaan Sandang;

2.2.3. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti;

2.2.4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan dan Sub. Kegiatan indikatif dari program ini meliputi :

Kegiatan :

3.1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub. Kegiatan :

3.1.1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

3.1.2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

3.1.3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

4) Program Penanganan Bencana

Kegiatan dan Sub. Kegiatan indikatif dari program ini meliputi :

Kegiatan :

4.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;

Sub. Kegiatan :

4.1.1. Penyediaan Makanan;

Kegiatan :

4.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Sub. Kegiatan :

4.2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kegiatan :

5.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota.

Sub. Kegiatan :

5.1.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota

Dengan Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Indikator Kinerja Program Dinas Sosial Tahun 2023

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023**

- VISI** : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- MISI** : Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
- TUJUAN** : Sistem Perlindungan Sosial dalam Penanganan PPKS
- TUGAS** : Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Sosial
- FUNGSI** :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Sistem Perlindungan Sosial dalam Penanganan PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jumlah PSKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial}}{\text{Jumlah PSKS yang seharusnya menerima manfaat program pemberdayaan sosial}} \times 100$	- Data PMKS dan PSKS - Data BDT/DTKS (data berjalan)	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	$\frac{\text{Jumlah KPM penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial}}{\text{Jumlah KPM yang seharusnya menerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial}} \times 100$	- Data PMKS dan PSKS - Data BDT/DTKS (data berjalan)	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	<p>Jumlah korban bencana alam dan sosial penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <hr style="width: 100%; border: 1px solid black;"/> <p>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang seharusnya menerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Data PMKS dan PSKS - Data BDT/DTKS (data berjalan) - Assesment 	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
--	--	--	--	----------------------------	---	---	--	--

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	<p>Jumlah PPKS penerima manfaat kesejahteraan sosial</p> $\frac{\text{Jumlah PPKS penerima manfaat kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah PPKS yang seharusnya menerima manfaat kesejahteraan sosial}} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> - Data PMKS dan PSKS - Data BDT/DTKS (data berjalan) - Assesment 	BIDANG REHABILITASI SOSIAL
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	<p>Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Mantan Bupati yang dipelihara dan terawat dengan Baik</p> $\frac{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Mantan Bupati yang dipelihara dan terawat dengan Baik}}{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Mantan Bupati yang seharusnya dipelihara dan terawat dengan Baik}} \times 100$	- Data Makam	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

F. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Sosial, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto selama 5 Tahun (2021 – 2026), yaitu sebagai berikut;

TABEL II
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN RPJMD
DI BIDANG SOSIAL

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	SATUAN	2021	2022	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	SATUAN	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5			6	7	8	9
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	85	80	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	75	75	65	60
	Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi	PSM, TKSK, KUBE, LKSA dan Orang pengurus LKSA, Orang pengurus Katar, Oang klien PW	60, 18, 21, 16, 100, 2, 70, 304	60, 18, 11, 8 dan 100, 322, 50	Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi	Orang, Orang, Keluarga, Lembaga	60, 18, 90, 30	75, 18, 90, 35	100, 18, 95, 40	125, 18, 95, 45
	1. Jumlah PSM yang dibina	Orang	60	60	1. Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	60	75	100	125
	2. Jumlah TKSK yang dibina	Orang	18	18	2. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	18	18	18	18
	3. Jumlah KUBE Jasa dan e- warung yang diberdayakan	KUBE	21	11	3. Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Keluarga	90	90	95	95

	4. Jumlah LKSA, Karang Taruna, Karang Werdha, Panti Werda yang diberdayakan dan yang menerima bantuan; dan Jumlah pelaksanaan Penyuluhan	LKSA, dan Orang pengurus LKSA, Orang pengurus katar, Orang klien PW	16, 100, 2, 70, 304	8 dan 180, 322, 50	4. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Lembaga	30	35	40	45
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	85	60	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	60	55	55	50
	Jumlah data fakir miskin yang dikelola	Orang, Orang, Desa, Kecamatan, Keluarga	116, 134, 304, 18	19, 114, 304, 18, 78.930	Jumlah data fakir miskin yang dikelola	Orang/KPM, Keluarga, Keluarga, Orang	29.309, 324.480, 78.930, 34.163	29.309, 324.480, 78.930, 34.163	29.309, 324.480, 78.930, 34.163	29.309, 324.480, 78.930, 34.163
	1. Jumlah petugas pendampingan dan operator PKH	Orang Orang	116 134	19, 114	1. Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang Didata	Orang/KPM	29.309	29.309	29.309	29.309
	2. Tersedianya data verivali dan data PMKS-PSKS	Desa Kecamatan	304 18	304 18	2. Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	Keluarga	324.480	324.480	324.480	324.480
	3. Jumlah keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	Keluarga	0	78.930	3. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Keluarga	78.930	78.930	78.930	78.930
					4. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang	34.163	34.163	34.163	34.163
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	%	85	60	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	%	60	50	50	40

	1. Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Bulan, Bulan,	12, 12,	12, 12,	1. Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Orang, Tempat,	371, 10	371, 10	371, 10	371, 10
	1.1. Jumlah waktu tersedianya stock logistik bantuan korban bencana alam dan sosial;	Bulan	12	12	1.1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota;	Orang	371	371	371	371
	1.2. Jumlah waktu pelaksanaan tindakan operasional tanggap darurat bencana alam dan sosial.	Bulan	12	12	1.2. Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten / Kota.	Tempat	10	10	10	10
	2. Jumlah Tagana yang dibina	Orang	50	44	2. Jumlah Tagana yang dibina	Orang	50	50	50	50
	1.1. Jumlah Tagana yang dibina	Orang	50	44	1.2. Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Orang	50	50	50	50
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	%	85	60	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	%	55	50	45	40
	1. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Orang, Orang, Bulan, Orang	9, 82, 9, 12	9, 18, 9, 12	1. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Orang, Orang, Orang, Bulan, Orang, Orang	33, 15, 50, 50, 186	35, 15, 50, 50, 186	35, 20, 50, 50, 186	40, 20, 50, 50, 186
	1.1. Jumlah Pengemis dan Gelandangan yang menerima bantuan, Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima bantuan	Orang	9, 82	9, 18	1.1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	33	35	35	40
	1.2. Jumlah Pengemis dan Gelandangan yang diberdayakan	Orang	9	9	1.2. Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	15	15	20	20

	1.3. Jumlah orang terlantar yang dipulangkan	Bulan	12	12	1.3. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	50	60	60	75
					1.4. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	50	60	60	75
					1.5. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	186	186	186	186
	2. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi				2. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi					
	2.1. Jumlah PPKS (PSK, Anak Jalanan, Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Anak yang mengikuti tetirah, Pemulung, WRSE, Fakir Miskin, ODGJ) yang menerima bantuan	Orang	17 9 7 50 5 12 3	20	2.1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	30	40	40	50
	2.2. Jumlah PPKS (PSK, Anak Jalanan, Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Pencegahan Tindak Kekerasan Human Trafficking, Penanganan Balita, Anak Terlantar dan Adopsi, Pemulung, WRSE, Fakir Miskin, ODGJ) peserta pemberdayaan yang menerima bimbingan ketrampilan	Orang, Orang, Peserta adopsi	20 10 10 90 200 5 15 3	18, 20, 150	2.2. Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	150	150	175	175
	2.3. Jumlah pelaksanaan razia tim reaksi cepat PPKS, Jumlah peserta sosialisasi anak yang berhadapan dengan hukum, Jumlah anak yang mengikuti tetirah	Kali, Orang peserta ABH	2 300 50	1 150	2.3. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	Dokumen	2	2	3	3

	2.4. Jumlah Eks penderita kusta yang difasilitasi	KK	187	187	2.4. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	50	50	50	50
					2.5. Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	50	50	50	50
					2.6. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	50	50	50	50
					2.7. Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	50	50	50	50

G. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

Sasaran umum pembangunan Kesejahteraan sosial Kabupaten Mojokerto sejalan dengan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009) Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel. III

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	82%

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,50
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	82%
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	60
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.389.070.692	P-APBD 2023
2	Program Pemberdayaan Sosial	860.400.000	P-APBD 2023
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	11.266.170.605	P-APBD 2023
4	Program Penanganan Bencana	148.970.000	P-APBD 2023
5	Program Rehabilitasi Sosial	1.243.197.980	P-APBD 2023
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	15.000.000	APBD 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok : masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk : orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Penerima Bansos \& Layanan Sosial}}{\text{DTKS}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Penerima Bansos \& Layanan Sosial} - (\text{Realisasi} - \text{Jumlah Penerima Bansos \& Layanan Sosial})}{\text{DTKS}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Jumlah Penerima Bansos \& Layanan Sosial}) - \text{Realisasi}}{\text{DTKS}} \times 100\%$$

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
≥ 100	Memuaskan
$86 \leq 100$	Sangat Baik
$71 \leq 85$	Baik
$56 \leq 70$	Cukup
≤ 55	Kurang

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021 – 2026, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023, dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Indikator sasaran yang digunakan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2021-2026 adalah Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Indikator Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto beserta target, realisasi dan capaiannya seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Realisasi	% Capaian
Sistem Perlindungan Sosial dalam Penanganan PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	82%	82,18%	100,22%

Sumber Data : Dinas Sosial

Persentase indikator kinerja sasaran perangkat daerah yang tercapai, dimana capaian kinerja indikator ini adalah 100,22%, dengan realisasi kinerjanya 82,18% melebihi target 82%, ini termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja *memuaskan*. (<https://bit.ly/PPKSBansos2023>)

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Program

Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75%	75%	100%
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial	55%	55%	100%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	60%	60%	100%

Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	60%	60%	100%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100%	100%	100%

Sumber Data : Dinas Sosial

Persentase indikator kinerja program perangkat daerah yang tercapai, dimana capaian kinerja indikator ini adalah 100%, dengan realisasi kinerjanya 100% melebihi target 90%, ini termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja *sangat baik*.

Tabel. 3.3
Pencapaian Kinerja Kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi	50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga	50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga	100%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	181 Orang, 23 Orang, 50 Orang	181 Orang, 23 Orang, 50 Orang	100%
3.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	50 Orang, 50 Orang, 50 Orang, 50 Orang	50 Orang, 50 Orang, 50 Orang, 50 Orang	100%
4.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dikelola	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 20 KPM	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 20 KPM	100%

5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	841 Orang	841 Orang	100%
6.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tagana yang dibina	48 Orang	48 Orang	100%
7.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	6 Makam	6 Makam	100%

Sumber Data : Dinas Sosial

Persentase indikator kinerja kegiatan perangkat daerah yang tercapai, dimana capaian kinerja indikator ini adalah 100%, dengan realisasi kinerjanya 100%, dan target 100%, ini termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja *sangat baik*.

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sub. Kegiatan

No.	Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	100%
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	18 Orang	100%
3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	41 Lembaga (LKS), 19 Pengurus Katar (Kec+Kab), 8 UEP Katar (Desa)	41 Lembaga (LKS), 19 Pengurus Katar (Kec+Kab), 8 UEP Katar (Desa)	100%
4.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	181 Orang	181 Orang	100%

5.	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang	23 Orang	100%
6.	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	50 Orang	100%
7.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	100%
8.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	50 Orang	100%
9.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	50 Orang	100%

10.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	50 Orang	100%
11.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	324.480 Keluarga	324.480 Keluarga	100%
12.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	78.930 Keluarga	78.930 Keluarga	100%
13.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	20 KPM	20 KPM	100%
14.	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	841 Orang	841 Orang	100%
15.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	48 Orang	48 Orang	100%

16.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	6 Makam	6 Makam	100%
-----	---	---	---------	---------	------

Sumber Data : Dinas Sosial

Persentase indikator kinerja sub. kegiatan perangkat daerah yang tercapai, dimana capaian kinerja indikator ini adalah 100%, dengan realisasi kinerjanya 100%, dan target 100%, ini termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja *sangat baik*.

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023 terdiri dari 5 Indikator kinerja program untuk mendukung 1 sasaran strategik. Capaian kinerja (performance results) selama Tahun 2023, sebanyak 7 indikator kinerja kegiatan dan 16 indikator kinerja sub kegiatan sudah mencapai 100 %.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi Kinerja	
			2022	2023
1	2	3	4	5
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	82%	80%	82,18%
Program	Indikator Kinerja Program	Target	2022	2023
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75%	80%	100%
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial	55%	60%	100%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	60%	60%	100%

Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	60%	60%	100%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100%	0	100%

Sumber Data : Dinas Sosial

Tabel 3.6
Capaian Anggaran Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	13.533.738.585	13.327.013.738	98,47%

Sumber Data : Dinas Sosial

Tabel 3.7
Tingkat Efisiensi Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100,22%	95,53%	4,69%

Sumber Data : Dinas Sosial

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	-	-	-
Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	-	-	-
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	-
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	-	-	-
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	-	-	-

Tidak ada Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra (2026)	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	82%	82,18%	0,18%

Sumber Data : Dinas Sosial

2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang tersedia untuk setiap Perangkat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dilakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi, dengan memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis diukur dengan masukan (*input*) anggaran dengan realisasi, sedangkan efisiensi dengan cara membandingkan antara *input* dengan *output*, dan efektifitas dengan cara membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan. Adapaun ikhtiar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebesar 95,53 % sebagai berikut :

Total Belanja Tahun 2023 : Rp. 19.922.809.277,-

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Belanja Pegawai	5.310.199.000,-	
2.	Belanja Barang dan Jasa	13.937.195.057,-	
3.	Belanja Bantuan Sosial	675.415.220,-	
T O T A L		19.922.809.277,-	

Tabel 2.1
Alokasi Anggaran Persasaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN
1.	Sistem Perlindungan Sosial dalam Penanganan PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	19.922.809.277	95,53%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	13.533.738.585	98,47%
NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	CAPAIAN
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	860.400.000	97,25%
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial	1.243.197.980	93,69%
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	11.266.170.605	99,39%

4.	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	148.970.000	75,87%
5.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	15.000.000	98,21%

Sumber Data : Dinas Sosial

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	82%	82,18 %	100,22 %	13.533.738.585	13.327.013.738	98,47 %
No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75%	75%	100%	840.600.000	836.704.750	97,25 %
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial	55%	55%	100%	1.243.197.980	1.164.720.625	93,69 %

3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	60%	60%	100%	11.266.170.605	11.197.840.163	99,39 %
4.	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	60%	60%	100%	148.970.000	113.016.900	75,87 %
5.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100%	100%	100%	15.000.000	14.731.300	98,21 %

Sumber Data : Dinas Sosial

Capaian Kinerja dan Realisasi Belanja Triwulan IV pada Dinas Sosial Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN		SISA
					(Rp)	%	(Rp)
1	2	3		4	5	6	7
	<i>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel</i>						
	<i>Indeks Profesionalitas ASN</i>		60	78,01			
	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>		80,50	80,98			
	<i>Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi</i>		1	2			
	<i>Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</i>		90	95,53			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	6.389.070.692	90%	100%	5.702.267.019	89,28%	684.803.673
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	90%	100%	11.845.700	78,97%	3.154.300

	6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	2 Dokumen	2	6.525.500	87,01%	974.500
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	6 Laporan	6	5.320.200	70,94%	2.179.800
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.213.979.000	82%	100%	4.623.009.569	95,53%	590.969.431
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.213.979.000	40 Orang/ Bulan	40	4.623.009.569	95,53%	590.969.431
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.195.840	87%	100%	292.377.250	91,31%	27.818.590
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.600.000	12 Laporan	12	172.924.642	87,51%	24.675.358
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	122.595.840	12 Laporan	12	119.452.608	97,44%	3.143.232
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.080.832	87%	100%	159.840.000	90,26%	17.240.832
	1. Penyediaan Bahan/Material	60.000.000	4 Paket	4	57.495.000	95,83%	2.505.000
	2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.080.832	4 Paket	4	30.725.000	87,58%	4.355.832
	3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	12 Laporan	12	50.220.000	83,70%	9.780.000
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000	3 Paket	3	21.400.000	97,27%	600.000

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	662.815.020	85%	100%	617.194.500	93,12%	45.620.520
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.000.000	13 Unit	13	193.039.400	91,92%	16.960.600
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	452.815.020	8 Unit	8	424.155.100	93,67%	28.659.920
2.	Program Pemberdayaan Sosial	860.400.000	75%	100%	836.704.750	97,25%	23.695.250
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	860.400.000	50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga	50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga	836.704.750	97,25%	23.695.250
	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	44.000.000	50 Orang	50	41.530.550	94,39%	2.469.450
	2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	131.000.000	18 Orang	18	121.817.150	92,99%	9.182.850
	3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	685.400.000	68 Lembaga	68	673.357.050	98,24%	12.042.950

3.	Program Rehabilitasi Sosial	1.243.197.980	55%	100%	1.164.720.625	93,69%	78.477.355
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	330.952.980	181 Orang, 50 Orang, 23 Orang	181 Orang, 50 Orang, 23 Orang	306.948.000	92,75%	24.004.980
	1. Penyediaan Makanan	150.000.000	181 Orang	181	143.374.000	95,58%	6.626.000
	2. Pemberian Layanan Kedaruratan	105.952.980	50 Orang	50	96.925.000	91,48%	9.027.980
	3. Penyediaan Alat Bantu	75.000.000	23 Orang	23	66.649.000	88,87%	8.351.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	912.245.000	200 Orang	200 Orang	857.772.625	94,03%	54.472.375
	1. Penyediaan Permakanan	384.100.000	50 Orang	50	335.635.725	87,38%	48.464.275
	2. Penyediaan Sandang	83.145.000	50 Orang	50	79.924.900	96,13%	3.220.100
	3. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	25.000.000	50 Orang	50	24.974.000	99,90%	26.000

	4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	420.000.000	50 Orang	50	417.238.000.	99,34%	2.762.000
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	11.266.170.605	60%	100%	11.197.840.163	99,39%	68.330.442
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	11.266.170.605	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 20 KPM	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 20 KPM	11.197.840.163	99,39%	68.330.442
	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	255.000.000	324.480 Keluarga	324.480	243.297.813	95,41%	11.702.187
	2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10.712.016.605	78.930 Keluarga	78.930	10.689.760.350	99,79%	22.256.255
	3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	299.154.000	20 KPM	20	264.782.000	88,51%	34.372.000
5.	Program Penanganan Bencana	148.970.000	60%	100%	113.016.100	75,87%	35.953.100
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	65.345.000	841 Orang	841 Orang	52.053.400	79,66%	13.291.600
	1. Penyediaan Makanan	65.345.000	841 Orang	841	52.053.400	79,66%	13.291.600

	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	83.625.000	48 Orang	48 Orang	60.963.500	72,90%	22.661.500
	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	83.625.000	48 Orang	48	60.963.500	72,90%	22.661.500
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	15.000.000	100%	100%	14.731.300	98,21%	268.700
	Pemeeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	15.000.000	6 Makam	6 Makam	14.731.300	98,21%	268.700
	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	15.000.000	6 Makam	6 Makam	14.051.500	98,21%	268.700
	JUMLAH	19.922.809.277			19.031.280.757	95,53%	891.528.520

Capaian untuk masing- masing sasaran, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sub. kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran ” Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) ” dengan indikator sasaran “ Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar “.

Dengan target sasaran 82%, realisasi 82,18%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,22%.

Adapun indikator kinerja program yang seluruhnya sudah mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

a. Indikator Kinerja 1 **“Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial”.**

Adapun target kinerja Program Pemberdayaan Sosial sebesar 75%, realisasi kinerja program sebesar 75% dan persentase capaian sebesar 100%, dengan rincian :

Kegiatan :

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 860.400.000,-

Dengan indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi.

Adapun target kinerja Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota adalah 50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga, dengan realisasi kinerja kegiatan terealisasi 50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Dengan penjelasan **sub. kegiatan** sebagai berikut :

Sub. Kegiatan :

a.1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja sub. kegiatan adalah Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dengan target kinerja sub. kegiatan 50 orang PSM, realisasi kinerja sub. kegiatan terealisasi 50 orang PSM, dengan persentase capaian kinerja sub. kegiatan 100%.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Masukan** anggaran untuk sub. kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota adalah jumlah dana sebesar Rp. 44.000.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
- **Hasil** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Kemampuan Potensi Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
- **Sasaran** sub. kegiatan adalah 50 orang PSM.
- **Capaian Kinerja Sub. Kegiatan : 100 %**
- **Realisasi** masukan anggaran untuk sub. kegiatan adalah sebesar Rp. 41.530.550,- atau 94,39%.

a.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja sub. kegiatan adalah Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dengan target kinerja sub. kegiatan 18 orang TKSK, realisasi kinerja sub. kegiatan terealisasi 18 orang TKSK, dengan persentase capaian kinerja sub. kegiatan 100%.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Masukan** anggaran untuk sub. kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota adalah jumlah dana sebesar Rp. 131.000.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota.
- **Hasil** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- **Sasaran** sub. kegiatan adalah 18 orang TKSK.
- **Capaian Kinerja Sub. Kegiatan : 100 %**
- **Realisasi** masukan anggaran untuk sub. kegiatan adalah sebesar Rp. 121.817.150,- atau 92,99%.

a.3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja sub. kegiatan adalah Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota.

Dengan target kinerja sub. kegiatan 41 Lembaga (LKS), 19 Pengurus Katar (Kec+Kab), 8 UEP Katar (Desa), realisasi kinerja sub. kegiatan terealisasi 41 Lembaga (LKS), 19 Pengurus Katar (Kec+Kab), 8 UEP Katar (Desa), dengan persentase capaian kinerja sub. kegiatan 100%.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Masukan** untuk sub. kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota adalah jumlah dana sebesar Rp. 685.400.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota.
- **Hasil** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota.
- **Sasaran** sub. kegiatan adalah adanya pemberdayaan bagi 41 Lembaga (LKS), 19 Pengurus Katar (Kec+Kab), 8 UEP Katar (Desa).
- **Capaian Kinerja Sub. Kegiatan :100 %**
- **Realisasi** masukan anggaran untuk sub. kegiatan adalah sebesar Rp. 121.817.150,- atau 92,99%.

2. Program Rehabilitasi Sosial

b. Indikator Kinerja 2 “Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial.

Adapun target kinerja Program Rehabilitasi Sosial sebesar 55%, realisasi kinerja program sebesar 55% dan persentase capaian sebesar 100%.

Pada Program Rehabilitasi Sosial ini ada 2 (dua) kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 1.243. 197.980,-

Adapun rincian dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Kegiatan :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan jumlah dana sebesar Rp. 330.952.980,-

Dengan indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi.

Adapun target kinerja Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial adalah 181 Orang eks penderita kusta, 23 Orang penyandang disabilitas, 50 Orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan, dengan realisasi kinerja kegiatan terealisasi 181 Orang eks penderita kusta, 23 Orang penyandang disabilitas, 50 Orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Dengan penjelasan **sub. kegiatan** sebagai berikut :

Sub. Kegiatan :

b.1.1. Penyediaan Permakanan, dengan indikator kinerja sub. kegiatan adalah Jumlah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota.

Dengan target kinerja sub. kegiatan 181 Orang eks penderita kusta, dengan persentase capaian kinerja sub. kegiatan 100%.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Masukan** anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Permakanan adalah jumlah dana sebesar Rp. 150.000.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota.

- **Hasil** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota.
- **Sasaran** sub. kegiatan adalah 181 orang Eks Penderita Kusta di Sumberglagah.
- **Capaian Kinerja Sub. Kegiatan : 100 %**
- **Realisasi** masukan anggaran untuk sub. kegiatan adalah sebesar Rp. 143.374.000,- atau 95,58%.

b.1.2. Penyediaan Alat Bantu, dengan indikator kinerja sub. kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dengan target kinerja sub. kegiatan 23 Orang penyandang disabilitas, dengan persentase capaian kinerja sub. kegiatan 100%.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Masukan** anggaran untuk sub. kegiatan Penyediaan Alat Bantu adalah jumlah dana sebesar Rp. 75.000.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- **Hasil** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota.
- **Sasaran** sub. kegiatan adalah 23 orang penyandang disabilitas.
- **Capaian Kinerja Sub. Kegiatan : 100 %**
- **Realisasi** masukan anggaran untuk sub. kegiatan adalah sebesar Rp. 66.649.000,- atau 88,87%.

b.1.3. Pemberian Layanan Kedaruratan, dengan indikator kinerja sub. kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota.

Dengan target kinerja sub. kegiatan 50 Orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan, dengan persentase capaian kinerja sub. kegiatan 100%.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Masukan** anggaran untuk sub. kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan adalah jumlah dana sebesar Rp. 105.952.980,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota.
- **Hasil** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota.
- **Sasaran** sub. kegiatan adalah 50 Orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan.
- **Capaian Kinerja Sub. Kegiatan : 100 %**
- **Realisasi** masukan anggaran untuk sub. Kegiatan adalah sebesar Rp. 96.925.000,- atau 91,48%.

Kegiatan :

2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan jumlah dana sebesar Rp. 912.245.000,-

Dengan indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi.

Adapun target kinerja Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial adalah 50 Orang lansia terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan, 50 Orang lansia terlantar yang mendapatkan sandang, 50 Orang lansia terlantar yang mendapatkan perbekalan kesehatan, dan 50 Orang lansia terlantar yang menerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Dengan penjelasan **sub. kegiatan** sebagai berikut :

Sub. Kegiatan :

b.2.1. Penyediaan Permakanan, dengan indikator kinerja sub. kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dengan target kinerja sub. kegiatan 50 Orang lansia terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan, dengan persentase capaian kinerja sub. kegiatan 100%.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Masukan** anggaran untuk sub. kegiatan Penyediaan Permakanan adalah jumlah dana sebesar Rp. 384.100.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota.
- **Hasil** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standard Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota.

- **Sasaran** sub. kegiatan adalah 50 Orang lansia terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan.
- **Capaian Kinerja Sub. Kegiatan : 100 %**
- **Realisasi** masukan anggaran untuk sub. kegiatan adalah sebesar Rp. 335.635.725,- atau 87,38%.

b.2.2. Penyediaan Sandang, dengan indikator kinerja sub. kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota.

Dengan target kinerja sub. kegiatan 50 Orang lansia terlantar yang mendapatkan sandang, dengan persentase capaian kinerja sub. kegiatan 100%.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Masukan** anggaran untuk sub. kegiatan Penyediaan Sandang adalah jumlah dana sebesar Rp. 83.145.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota.
- **Hasil** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota.
- **Sasaran** sub. kegiatan adalah 50 Orang lansia terlantar yang mendapatkan sandang.
- **Capaian Kinerja Sub. Kegiatan : 100 %**
- **Realisasi** masukan anggaran untuk sub. kegiatan adalah sebesar Rp. 79.924.900,- atau 96,13%.

b.2.3. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti, dengan indikator kinerja sub. kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten / Kota.

Dengan target kinerja sub. kegiatan 50 Orang lansia terlantar yang mendapatkan perbekalan kesehatan, dengan persentase capaian kinerja sub. kegiatan 100%.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Masukan** anggaran untuk sub. kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti adalah jumlah dana sebesar Rp. 25.000.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten / Kota.
- **Hasil** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten / Kota.
- **Sasaran** sub. kegiatan adalah 50 Orang lansia terlantar yang mendapatkan perbekalan kesehatan.
- **Capaian Kinerja Sub. Kegiatan : 100 %**
- **Realisasi** masukan anggaran untuk sub. kegiatan adalah sebesar Rp. 24.974.000,- atau 99,90%.

b.2.4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, dengan indikator kinerja sub. kegiatan adalah Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota.

Dengan target kinerja sub. kegiatan 50 Orang lansia terlantar yang menerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, dengan persentase capaian kinerja sub. kegiatan 100%.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Masukan** anggaran untuk sub. kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial adalah jumlah dana sebesar Rp. 420,000,000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota.
- **Hasil** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota.
- **Sasaran** sub. kegiatan adalah 50 Orang lansia terlantar yang menerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.
- **Capaian Kinerja Sub. Kegiatan : 100 %**
- **Realisasi** masukan anggaran untuk sub. kegiatan adalah sebesar Rp. 417.238.000,- atau 99,34%.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

c. Indikator Kinerja 3 “Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Adapun target kinerja Program Rehabilitasi Sosial sebesar 60%, realisasi kinerja program sebesar 60% dan persentase capaian sebesar 100%.

Adapun rincian dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Kegiatan :

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 11.266.170.605,-

Dengan indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah data fakir miskin yang dikelola.

Adapun target kinerja Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah 324.480 Keluarga penerima bantuan pengentasan kemiskinan, 78.930 Keluarga penerima bantuan sosial, 20 KPM penerima bantuan pengembangan ekonomi, dengan realisasi kinerja kegiatan terealisasi 324.480 Keluarga penerima bantuan pengentasan kemiskinan, 78.930 Keluarga penerima bantuan sosial, 20 KPM penerima bantuan pengembangan ekonomi, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Dengan penjelasan **sub. kegiatan** sebagai berikut :

Sub. Kegiatan :

c.1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja sub. kegiatan adalah Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota.

Dengan target kinerja sub. kegiatan 324.480 Keluarga penerima bantuan pengentasan kemiskinan, dengan persentase capaian kinerja sub. kegiatan 100%.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Masukan** anggaran untuk sub. kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah jumlah dana sebesar Rp. 255.000.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota.
- **Hasil** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten / Kota.

- **Sasaran** sub. kegiatan adalah 324.480 Keluarga penerima bantuan pengentasan kemiskinan.
 - **Capaian Kinerja Sub. Kegiatan : 100 %**
 - **Realisasi** masukan anggaran untuk sub. kegiatan adalah sebesar Rp. 243.297.813,- atau 95,41%.
- c.2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, dengan indikator kinerja sub. kegiatan adalah Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota.
- Dengan target kinerja sub. kegiatan 78.930 Keluarga penerima bantuan sosial, dengan persentase capaian kinerja sub. kegiatan 100%.
- Dengan penjelasan sebagai berikut :
- **Masukan** anggaran untuk sub. kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga adalah jumlah dana sebesar Rp. 10.712.016.605,-
 - **Keluaran** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota.
 - **Hasil** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota.
 - **Sasaran** sub. kegiatan adalah Jumlah keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota (78.930 Keluarga).
 - **Capaian Kinerja Sub. Kegiatan : 100 %**
 - **Realisasi** masukan anggaran untuk sub. kegiatan adalah sebesar Rp. 10.689.760.350,- atau 99,79%.
- c.3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, dengan indikator kinerja sub. kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota.

Dengan target kinerja sub. kegiatan 20 KPM penerima bantuan pengembangan ekonomi, dengan persentase capaian kinerja sub. kegiatan 100%.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Masukan** anggaran untuk sub. kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat adalah jumlah dana sebesar Rp. 299.154.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota.
- **Hasil** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Terpenuhinya Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota.
- **Sasaran** sub. kegiatan adalah Jumlah keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota (38.044 KPM).
- **Capaian Kinerja Sub. Kegiatan : 100 %**
- **Realisasi** masukan anggaran untuk sub. kegiatan adalah sebesar Rp. 264.782.000,- atau 88,51%.

4. Program Penanganan Bencana

d. Indikator Kinerja 4 “Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial”

Adapun target kinerja Program Penanganan Bencana sebesar 60%, realisasi kinerja program sebesar 60% dan persentase capaian sebesar 100%.

Pada Program Penanganan Bencana ini ada 2 (dua) kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 148.970.000,-

Adapun rincian dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Kegiatan :

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 65.345.000,-

Dengan indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

Adapun target kinerja Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota adalah 841 Orang korban bencana alam dan sosial, dengan realisasi kinerja kegiatan terealisasi 841 Orang korban bencana alam dan sosial, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Dengan penjelasan **sub. kegiatan** sebagai berikut :

Sub. Kegiatan :

- d.1.1. Penyediaan Makanan, dengan indikator kinerja sub. kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dengan target kinerja sub. kegiatan 841 Orang korban bencana alam dan sosial, dengan persentase capaian kinerja sub. kegiatan 100%.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Masukan** anggaran untuk sub. kegiatan Penyediaan Makanan adalah jumlah dana sebesar Rp. 65.345.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota.

- **Hasil** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota.
- **Sasaran** sub. kegiatan adalah bantuan permakanan bagi 841 Orang korban bencana alam dan sosial.
- **Capaian Kinerja Sub. Kegiatan : 100 %**
- **Realisasi** masukan anggaran untuk sub. kegiatan adalah sebesar Rp. 52.053.400,- atau 79,66%.

Kegiatan :

2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 83.625.000,-

Dengan indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Tagana yang dibina.

Adapun target kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota adalah 48 Orang Tagana, dengan realisasi kinerja kegiatan terealisasi 48 Orang Tagana, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Dengan penjelasan **sub. kegiatan** sebagai berikut :

Sub. Kegiatan :

- d.2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, dengan indikator kinerja sub. kegiatan adalah Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota.

Dengan target kinerja sub. kegiatan 48 Orang Tagana, dengan persentase capaian kinerja sub. kegiatan 100%.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Masukan** anggaran untuk sub. kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana adalah jumlah dana sebesar Rp. 83.625.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota.
- **Hasil** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota.
- **Sasaran** sub. kegiatan adalah 48 Orang Tagana.
- **Capaian Kinerja Sub. Kegiatan : 100 %**
- **Realisasi** masukan anggaran untuk sub. kegiatan adalah sebesar Rp. 60.963.500,- atau 98,21%.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

e. Indikator Kinerja 5 “**Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola**”

Adapun target kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100%, realisasi kinerja program sebesar 100% dan persentase capaian sebesar 100%.

Kegiatan :

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 15.000.000,-

Dengan indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota.

Adapun target kinerja Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota adalah 6 Makam, dengan realisasi kinerja kegiatan terealisasi 6 Makam, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Dengan penjelasan **sub. kegiatan** sebagai berikut :

Sub. Kegiatan :

e.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota, dengan indikator kinerja sub. kegiatan adalah Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota.

Dengan target kinerja sub. kegiatan 6 Makam, dengan persentase capaian kinerja sub. kegiatan 100%.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Masukan** anggaran untuk sub. kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah jumlah dana sebesar Rp. 15.000.000,-
- **Keluaran** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota.
- **Hasil** yang diharapkan dari sub. kegiatan tersebut adalah Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota.
- **Sasaran** sub. kegiatan adalah 6 Makam.
- **Capaian Kinerja Sub. Kegiatan : 100 %**
- **Realisasi** masukan anggaran untuk sub. kegiatan adalah sebesar Rp. 14.731.300,- atau 98,21%.

Dari 1 sasaran yang ada dan 5 indikator kinerja program, 7 indikator kinerja kegiatan dan 16 indikator kinerja sub kegiatan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023 sudah mencapai target.

Faktor Keberhasilan :

1. Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan KAK;
2. Pelaksanaan anggaran sudah sesuai anggaran kas.

Faktor Kegagalan :

1. Adanya kenaikan harga pokok;
2. Adanya penambahan anggaran untuk Sub. Kegiatan yang mana di APBD Tahun 2023 tidak teranggarkan;
3. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat tentang penambahan (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) DBHCHT, sesuai dengan Data Proyeksi DBHCHT.

Tindak lanjut :

1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 (P-APBD);
2. Usulan penambahan anggaran melalui P-APBD Tahun 2023.

CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023

SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	NO	TARGET KINERJA				SAATUAN				
			TW I	TW II	TW III	TW IV					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	1	1.400.000	5.960.000	4.560.000	6.650.000	1 690.000	7.275.750	1 625.750	2 1 1 1	Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	2	1.909.000	5.400.000	3.491.000	6.490.000	2 1.090.000	7.400.000	2 910.000	1 2 1 1	Laporan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.627.108.000	3	836.691.147	2.006.169.989	1.169.478.842	3.313.722.701	3 1.307.552.712	4.670.633.113	3 1.356.910.412	3 3 3 3	Bulan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	485.000.000	4	0	6.990.000	6.990.000	71.592.000	4 64.602.000	472.689.582	4 401.097.582	3 3 3 3	Bulan
Penyediaan Bahan Logistik	100.000.000	5	7.370.000	24.112.000	16.742.000	30.592.000	5 6.480.000	93.917.000	5 63.325.000	3 3 3 3	Bulan

Kantor																
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.00 0.000	6	1.700 .000	17.59 0.000	15.89 0.000	23.25 0.000	6	5.660 .000	52.47 6.104	6	29.22 6.104	3	3	3	3	Bulan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.0 00.00 0	7	17.70 0.000	25.70 0.000	8.000 .000	53.11 5.000	7	27.41 5.000	110.5 70.60 9	7	57.45 5.609	3	3	3	3	Bulan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.00 0.000	8	15.59 6.901	30.05 7.790	14.46 0.889	47.72 5.682	8	17.66 7.892	70.57 2.162	8	22.84 6.480	3	3	3	3	Bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.5 95.84 0	9	18.64 1.970	48.46 9.122	29.82 7.152	78.29 6.274	9	29.82 7.152	118.0 65.80 0	9	39.76 9.526	3	3	3	3	Bulan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	246.0 00.00 0	1 0	38.67 2.000	83.94 4.000	45.27 2.000	121.6 32.40 0	1 0	37.68 8.400	230.5 54.00 0	1 0	108.9 21.60 0	3	3	3	3	Bulan

LAPORAN KINERJA DINSOS KAB.MOJOKERTO – 2023

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.00 0.000	1 1	2.160 .000	7.230 .000	5.070 .000	19.83 6.800	1 1	12.60 6.800	59.31 2.500	1 1	39.47 5.700		3	3	3	3	Bulan
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.00 0.000	1 2	1.718 .000	3.773 .000	2.055 .000	19.49 5.250	1 2	15.72 2.250	47.56 0.490	1 2	28.06 5.240	Pemberdayaan	0	6 0	0	0	Orang

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	13	0	22.428.250	22.428.250	43.736.750	13	21.308.500	73.006.750	13	29.270.000	0	0	18	0	Orang
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	14	0	16.543.250	16.543.250	48.136.750	14	31.593.500	248.136.750	14	200.000.000	0	5	5	5	KUBE

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.465.000.000	15	145.818.300	389.557.855	243.739.555	948.626.782	15	559.068.927	1.368.211.747	15	419.584.965					50	0	8,90	90,322	50 Org klien PW, 8 LK SA, 90 orang pengurus LK SA (180), 322 Orang pengurus Kat ar
Penyediaan Alat Bantu	50.000.000	16	0	0	0	0	16	0	48.871.080	16	48.871.080	Rehabilitasi	0	0	0	0	0	0	9,18	Orang, Orang

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	25.00 0.000	1 7	0	10.10 9.900	10.10 9.900	18.10 9.804	1 7	7.999 .904	23.63 1.304	1 7	5.521. 500	0	9	0	0	Orang	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.00 0.000	1 8	4.725 .000	20.32 0.000	15.59 5.000	33.55 0.000	1 8	13.23 0.000	43.97 3.750	1 8	10.42 3.750	3	3	3	3	Bulan	
Penyediaan Permaknaan	150.0 00.00 0	1 9	4.429 .080	135.5 00.66 0	131.0 71.58 0	143.5 00.66 0	1 9	8.000 .000	143.5 00.66 0	1 9	0	Rehabilitasi	0	1 8 6	0	0	KK
Penyediaan Alat Bantu	100.0 00.00 0	2 0	0	0	0	78.14 0.448	2 0	78.14 0.448	78.14 0.448	2 0	0	0	0	0	20	Orang	

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	150.000.000	21	13.200.200	37.259.200	24.059.000	88.928.460	21	51.669.260	142.902.460	21	53.974.000	0	20	150	0	Orang, Peserta adopsi, Orang
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	134.880.832	22	7.615.000	43.411.200	35.796.200	86.984.360	22	43.573.160	134.083.960	22	47.099.600	0	150	11	0	Peserta ABH, Kali
Pendataan Fakir Miskin Cakupan	300.000.000	23	32.124.000	73.522.000	41.398.000	192.638.570	23	119.116.570	283.452.320	23	90.813.750	19,114	0	0	0	Orang, Orang

Daerah Kabupaten /Kota																			
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	300.000.000	24	73.885.000	151.232.330	77.347.330	249.852.740	24	98.620.410	295.212.670	24	45.359.930								
Penyediaan Makanan	100.000.000	25	6.033.850	6.033.850	0	16.274.650	25	10.240.800	64.300.835	25	48.026.185	Bencana	3	3	3	3			Desa
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	50.000.000	26	23.287.000	26.607.000	3.320.000	30.627.000	26	4.020.000	45.440.000	26	14.813.000		3	3	3	3			Bulan
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	150.000.000	27	3.060.000	8.087.000	5.027.000	39.807.176	27	31.720.176	141.256.626	27	101.449.450		0	0	0	44			Orang
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan	11.224.124.268	28	0	0	0	0	28	0	10.694.420.775	28	10.694.420.775	Linjamsos	0	0	0	78.930			Keluarga

Keluarga								
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43.200.000	29			29	39.672.000	29	39.672.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	299.525.800	30			30	298.765.753	30	298.765.753
	21.879.434.740		1.257.736.448	3.206.008.396	1.948.271.948	5.811.312.257	2.605.303.861	20.108.006.998
								14.296.694.741

	0	0	0	108	Steel
	0	0	0	3	Bulan

Total Anggaran **21.879.434.740**

RUTIN

TARGET KINERJA	Realisasi	%
	12	100

ran	740			
Realisasi	20.10 8.006. 998	DAY ASO S	65 3	653 100
Sisa	1.771. 427.7 42	REH ABS OS	54 6	546 100
%	91,90	LINJ AMS OS BEN CAN A	79 .3 67	79. 367 100
			12	12 100

Tabel 3.2.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100,22%	95,53%	4,69%
		Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	97,25%	2,75%
		Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	100%	93,69%	6,31%
		Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	99,39%	0,61%
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	100%	75,87%	24,13%
		Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100%	100%	0%

Sumber Data : Dinas Sosial

LAPORAN KINERJA DINSOS KAB.MOJOKERTO – 2023

Tabel 3.2.4
Isu-Isu Strategis Bidang Sosial

ISU-ISU STRATEGIS

1. Kemiskinan Ekstrem
2. Perlindungan Sosial

Inovasi Bidang Sosial



1. TINDAK LANJUT EVALUASI

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2023, rata-rata mencapai target, maka tindak lanjut yang bisa dilaksanakan adalah :

1. Melaksanakan monitoring capaian kinerja setiap bulan, triwulan, sehingga apabila ada kendala pencapaian kinerja dapat dicari solusi dalam upaya peningkatan capaian kinerja.
2. Memperbanyak inovasi program untuk mendukung capaian target kinerja.
3. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait pembangunan sosial membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, ini disusun untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi serta kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto berdasarkan tolak ukur perencanaan strategik dan sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka laporan kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban Instansi kepada kepada publik. Oleh karena itu diharapkan akan menumbuhkan saran – saran dan kritik – kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internal dan eksistensi eksternal Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Sebagai Instansi yang menangani penyelenggaraan pembangunan bidang sosial di Kabupaten Mojokerto maka harus selalu menjaga kualitas kinerja, karena hal tersebut akan terkait langsung dengan tingkat derajat sosial masyarakat dan dengan laporan kinerja Dinas Sosial bisa selalu konsisten dan berkelanjutan meningkatkan kualitas kinerjanya.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto pada Tahun mendatang disarankan untuk setiap pengelola program melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan kinerja sehingga pelaksanaan program kegiatan tepat waktu.
2. Memperhatikan tertib administrasi sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
3. Memperluas jangkauan pelaksanaan program kegiatan sehingga terdapat pemerataan pelayanan kepada masyarakat (PPKS).
4. Menjadwalkan kegiatan dan membuat SOP sebelum pelaksanaan program kegiatan.
5. Membuat KAK.
6. Membuat RKA kegiatan.
7. Menyusun laporan tepat waktu.

**PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Satuan	Tahun 2023		Capaian Target (%)	Ket
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	66	86.36	130.84%	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,50	80,98	100,60%	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi	Buah	1	2	200%	Jumlah Inovasi
		IP ASN Perangkat Daerah	Nilai	60	78,01	130%	IP ASN
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	90	90,53	106,14	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	90%	90%	100%	
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	%	90%	90%	100%	

		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	90%	90%	100%	
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	%	90%	90%	100%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100%	
	1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	100%	
	2.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	100%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	82%	95,53%	106,14%	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	82%	95,53%	106,14%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40	40	100%	
	1.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40	40	100%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	87%	87%	100%	
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	%	87%	87%	100%	

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	100%	
	1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	100%	
	2.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	87%	87%	100%	
		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	%	87%	87%	100%	
		Penyediaan Bahan/Material	Paket	4	4	100%	
	1.	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	4	100%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	4	4	100%	
	2.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	3	3	100%	
	3.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100%	

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100%	
	4.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	85%	85%	100%	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	85%	85%	100%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	13	13	100%	
	1.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	13	100%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	8	8	100%	
	2.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	8	100%	

2.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	82%	82,18%	100,22%		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	%	75%	75%	100%		
		Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	75%	75%	100%		
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Orang, Orang, Lembaga	50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga	50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga	100%		
		Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi	Orang, Orang, Lembaga	50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga	50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga	100%		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50	100%		
		1.	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50	100%	

		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	18	18	100%	
	2.	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	18	18	100%	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	68	68	100%	
	3.	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Lembaga (LKS), Pengurus Katar (Kec+Kab), UEP Katar (Desa)	41, 19, 8	41, 19, 8	100%	

		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	%	55%	55%	100%	
		Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	%	55%	55%	100%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	181 Orang, 23 Orang, 50 Orang	181 Orang, 23 Orang, 50 Orang	100%	
		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Orang	181 Orang, 23 Orang, 50 Orang	181 Orang, 23 Orang, 50 Orang	100%	
		Penyediaan Permakanan	Orang	181	181	100%	
	1.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	181	181	100%	
		Penyediaan Alat Bantu	Orang	23	23	100%	
	2.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	23	23	100%	

		Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang	50	50	100%	
	3.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	50	50	100%	
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantis Sosial	Orang	50 Orang, 50 Orang, 50 Orang, 50 Orang	50 Orang, 50 Orang, 50 Orang, 50 Orang	100%	
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantis Sosial yang direhabilitasi	Orang	50 Orang, 50 Orang, 50 Orang, 50 Orang	50 Orang, 50 Orang, 50 Orang, 50 Orang	100%	
		Penyediaan Permakanan	Orang	50	50	100%	
	1.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50	100%	
		Penyediaan Sandang	Orang	50	50	100%	
	2.	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	50	50	100%	

		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	50	50	100%	
	3.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	50	50	100%	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	50	50	100%	
	4.	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	50	50	100%	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	%	60%	60%	100%	
		Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	60%	60%	100%	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga, Keluarga, KPM	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 20 KPM	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 20 KPM	100%	
		Jumlah data fakir miskin yang dikelolakerto	Keluarga, Keluarga, KPM	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 20 KPM	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 20 KPM	100%	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga	324.480	324.480	100%	
	1.	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	324.480	324.480	100%	

		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	78.930	78.930	100%	
	2.	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Keluarga	78.930	78.930	100%	
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	KPM	20	20	100%	
	3.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	KPM	20	20	100%	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	%	60%	60%	100%	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	%	60%	60%	100%	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Orang	841	841	100%	
		Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Orang	841	841	100%	
		Penyediaan Makanan	Orang	841	841	100%	
	1.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	841	841	100%	

		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	48	48	100%	
		Jumlah Tagana yang dibina	Orang	48	48	100%	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Orang	48	48	100%	
	1.	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	48	48	100%	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	%	100%	100%	100%	
		Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	%	100%	100%	100%	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Makam	6	6	100%	
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	Makam	6	6	100%	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Makam	6	6	100%	
	1.	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	Makam	6	6	100%	

**LAPORAN EVALUASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023
TRIWULAN IV**

OPD / UNIT KERJA : DINAS SOSIAL KABUPATEN
MOJOKERTO

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	KINERJA			SASARAN PPKS - PSKS			WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN (Rp)			KENDALA / PERMASALAHAN
			TARGET / SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,50	80,98	100,60								

	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90	95,53	106,14								
	Indeks Profesionalitas ASN	60	78,01	130,02								
	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi	1	2	200,00								

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	90	90	100				Okt - Des	6.389.070.6 92	5.704.267.0 19	89,28	
1.	Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	90	90	100					15.000.000	11.845.700	78,97	
1.	Penyusunan dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokume n	2	100,0 0					7.500.000	6.525.500	87,01	

2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6	100,00					7.500.000	5.320.200	70,94
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	82	95,53	106,14					5.213.979.000	4.623.009.569	88,67
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	12	100,00					5.213.979.000	4.623.009.569	88,67

3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	87	87	100					177.080.832	159.840.000	90,26	
1.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4	100,0 0					60.000.000	57.495.000	95,83	
2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4	100,0 0					35.080.832	30.725.000	87,58	
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12	100,0 0					60.000.000	50.220.000	83,70	

	4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3	100,00					22.000.000	21.400.000	97,27	
	4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	87	87	100					320.195.840	292.377.250	91,31	
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	100,00					197.600.000	172.924.642	87,51	

2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	100,0 0					122.595.84 0	119.452.60 8	97,44	
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	85	85	100					662.815.02 0	617.194.50 0	93,12	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13	100,0 0					210.000.00 0	193.039.40 0	91,92	

	2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	8 Unit	8	100,0 0				452.815.02 0	424.155.10 0	93,67	
--	----	--	---	---------------	---	------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	82	82,18	100,22								
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75	75	100,00	68 Orang	68 Orang	100,00	Okt - Des	860.400.000	836.704.750	97,25	

						Lemb aga	Lemb aga						
1.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi	50 Orang	50	100,0 0	50	50	100,0 0		860.400.00 0	836.704.75 0	97,25	
			18 Orang	18	100,0 0	18	18	100,0 0					
			68 Lembag a	68	100,0 0	68	68	100,0 0					
1.	Peningkata n Kemampua	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan	50	50	100,0 0	50	50	100,0 0		44.000.000	41.530.550	94,39	

	n Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenanga n Kabupaten/ Kota	Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang										
2.	Peningkata n Kemampua n Potensi Tenaga Kesejahtera an Sosial Kecamatan Kewenanga n Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	18	100,0 0	18	18	100,0 0	131.000.00 0	121.817.15 0	92,99		
3.	Peningkata n Kemampua	Jumlah Lembaga Kesejahteraan	68	68	100,0 0	68	68	100,0 0	685.400.00 0	673.357.05 0	98,24		

	n Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga										
--	--	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	60	60	100,00	403.410	403.410	100,00	Okt - Des	11.266.170.605	11.197.840.163	99,39	
						Keluarga	Keluarga						
						20	20	100,00					
						Orang	Orang						
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dikelola	324.480	324.480	100,00	324.480	324.480	100,00		11.266.170.605	11.197.840.163	99,39	
			Keluarga										
			78.930	78.930	100,00	78.930	78.930	100,00					

			Keluarga										
			20	20	100,00	20	20		100,00				
			Orang										
1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	324.480	324.480	100,00	324.480	324.480		100,00		255.000.000	243.297.813	95,41
			Keluarga										
2.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	78.930	78.930	100,00	78.930	78.930		100,00		10.712.016.605	10.689.760.350	99,79
			Keluarga										

		Kabupaten / Kota											
3.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	20	20	100,00	20	20	100,00		299.154.000	264.782.000	88,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	60	60	100,00	889	889	100,00	Okt - Des	148.970.000	113.016.900	75,87	
	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	841 Orang	841	100,00	841	841	100,00		65.345.000	52.053.400	79,66	
	1. Penyediaan	Jumlah Orang	841	841	100,00	841	841					79,66	

	Makanan	yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		0			100,0 0	65.345.000	52.053.400			
2.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Orang	48	48	100,0 0	48	48	100,0 0	83.625.000	60.963.500	72,90	
1.	Koordinasi, Sosialisasi	Jumlah Orang yang		48	48	100,0 0	48	48	100,0	83.625.000	60.963.500	72,90	

	dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang					0					
--	--------------------------------------	--	-------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	55	55	100,00	254 Orang	254	100,00	Okt - Des	1.243.197.980	1.164.720.625	93,69	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang	181 Orang 50 Orang 23 Orang	254	100,00	254	254	100,00		330.952.980	306.948.000	92,75	

		direhabilitasi											
1.	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	181 Orang	181	100,0 0	181	181	100,0 0		150.000.00 0	143.374.00 0	95,58	
2.	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	50	100,0 0	50	50	100,0 0		105.952.98 0	96.925.000 0	91,48	
3.	Penyediaan	Jumlah Orang yang	23	23	100,0	23	23	100,0				88,87	

	Alat Bantu	Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0			0	75.000.000	66.649.000		
--	------------	---	-------	---	--	--	---	------------	------------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	50 Orang	200	100,0 0	200	200	100,0 0		912.245.00 0	857.772.62 5	94,03	
	1. Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan	50 Orang	50	100,0 0	50	50	100,0 0		384.100.00 0	335.635.72 5	87,38	

		Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota											
2.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	50	100,0 0	50	50	100,0 0		83.145.000	79.924.900	96,13	
3.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	50 Orang	50	100,0 0	50	50	100,0 0		25.000.000	24.974.000	99,90	

		Kewenangan Kabupaten / Kota											
4.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	50	100,0 0	50	50	100,0 0		420.000.00 0	417.238.00 0	99,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100	100	100,00	6	6	100,00	Okt - Des	15.000.000	14.731.300	98,21	
	1. Pemeeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	6	6	100,00	6	6	100,00		15.000.000	14.731.300	98,21	
	1. Pemelihara	Jumlah Taman	6	6	100,0	6	6					98,21	

	an Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanny a pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	Makam	0			100,0 0	15.000.000	14.731.300		
TOTAL								19.922.809. 277	19.031.280. 757	95,53	



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRY RAHARJO MURDIANTO, S.STP., M.AP.
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, November 2023

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO

TRY RAHARJO MURDIANTO, S.STP., M.AP.
Pembina
NIP. 19870519 200602 1 002

LAMPIRAN :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	82%

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.50
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	82%
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	60
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.389.070.692	P APBD 2023
2	Program Pemberdayaan Sosial	860.400.000	P APBD 2023
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	11.266.170.605	P APBD 2023
4	Program Penanganan Bencana	148.970.000	P APBD 2023
5	Program Rehabilitasi Sosial	1.243.197.980	PAPBD 2023
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	15.000.000	APBD 2023

Mojokerto, November 2023

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO



TRY RAHARJO MURDIANTO, S.STP., M.AP.
Pembina
NIP. 19870519 200602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
INSPEKTORAT

Jalan RA. Basoeni Nomor 19 C Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61361
Telp. (0321) 329188 – 321959 Fax. (0321) 329188
Website : www.inspektorat.mojokertokab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023

Nomor : 705/ 2153 /416-060/2023
Tanggal : 30 Agustus 2023
Lampiran : -

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Mojokerto.

maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tim Evaluator melakukan evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto berdasarkan :
 - a. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : 090/1817/416-060/2023 tanggal 24 Juli 2023;
 - b. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : 090/2027/416-060/2023 tanggal 14 Agustus 2023.Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan diperoleh Nilai AKIP **80,98** dengan predikat **A (Memuaskan)**.
2. Tujuan dilaksanakannya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :
- Perencanaan Kinerja;
 - Pengukuran Kinerja;
 - Pelaporan Kinerja;
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
4. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.
4.	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

5.	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	> 30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

5. Pencapaian predikat **A (Memuaskan)**, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	21,88
b. Pengukuran Kinerja	30,00	26,13
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,26
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,71
Jumlah	100,00	80,98

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **21,88** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto telah memiliki dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dokumen tersebut telah diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu pada halaman *website* Si-SAKIP dan ESR Menpan, pada saat evaluasi halaman *website* Si-SAKIP Dinas Sosial dapat diakses sehingga evaluator

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

dapat memastikan bahwa dokumen perencanaan telah dipublikasikan namun halaman *website* umum Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang ada belum menampilkan data yang update dan masih disajikan data pada tahun 2021. Pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja antara lain yaitu :

- 1) Ketidakselarasan uraian sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra Perangkat Daerah (PD) 2021-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Sosial Tahun 2023 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
RENSTRA 2021-2026		IKU 2023		PK 2023	
-	-	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	1. Nilai RB PD 2. Nilai SAKIP 3. Rata-Rata Capaian Program 4. Persentase Realisasi Anggaran 5. IP ASN
-	-	-	-	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

- 2) Terdapat tidak konsistenan pada dokumen perencanaan Rencana Strategis dengan Perjanjian Kinerja (PK) :

Program pengelolaan taman makam pahlawan dengan indikator kinerja persentase jumlah taman makam pahlawan yang dikelola pada Perjanjian Kinerja (PK) tidak tercantum dalam dokumen perencanaan Rencana Strategis.

- 3) Penetapan target kinerja program yang tertuang pada Renja tahun 2023 tidak sesuai dengan renstra dan tidak memperhatikan capaian kinerja tahun lalu, antara lain sebagai berikut :

Program	Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Renja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2022
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	100%	75%	80%
	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial	100%	55%	60%

- 4) Penetapan target kinerja pada PK Tahun 2023 belum berdasarkan perhitungan yang logis, karena menetapkan target lebih rendah dibandingkan pencapaian realisasi kinerja pada tahun 2022, yaitu :

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target PK 2023	Pencapaian 2022 (LKJIP)
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75%	80%
2		Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial	55%	60%

- 5) Adanya perbedaan formulasi perhitungan kinerja yang tertuang pada IKU Tahun 2022 dan LKJIP Tahun 2022, sehingga ketercapaian target kinerja tidak bisa dinilai tingkat keberhasilannya, sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan IKU 2022	Formulasi Perhitungan LKJIP 2022
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	(Jumlah PSKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial : Jumlah PSKS yang seharusnya menerima manfaat program pemberdayaan sosial X 100	(Realisasi : Target) x 100%
	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	(Jumlah KPM penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial : Jumlah KPM yang seharusnya menerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial) X 100	(Realisasi : Target) x 100%
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat Perlindungan sosial	(Jumlah Tagana, korban bencana alam dan sosial penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial : Jumlah Tagana, korban bencana alam dan sosial yang seharusnya menerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial) X100	(Realisasi : Target) x 100%
	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	(Jumlah penerima PPKS : Jumlah penerima PPKS) x 100	Realisasi : Target) x 100%

- 6) Belum seluruh pegawai menetapkan perencanaan kinerja, dokumen SKP Kepala Dinas Sosial belum ditandatangani/disahkan oleh Bupati Mojokerto sebagai atasan langsung.
- 7) Pemantauan rencana aksi belum dilakukan secara berkala, serta pemantauan rencana aksi belum menjelaskan langkah perbaikan ke depan/belum terdapat RATL apabila terdapat kinerja yang belum tercapai sesuai target pada rencana aksi.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,13** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto telah melakukan pengukuran kinerja PD secara berkala secara triwulanan atas rencana aksi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja organisasi maupun individu telah dilakukan melalui aplikasi yaitu Aksara untuk kinerja organisasi dan Suhita untuk kinerja individu, dengan aplikasi tersebut pengukuran kinerja dapat dilakukan secara berkala dan secara berjenjang. Aplikasi tersebut juga memungkinkan pimpinan organisasi untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan.

Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja telah disusun mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja, dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) *namun* belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) jika terjadi kesalahan data dalam pengumpulan data kinerja, hal ini berpotensi menyebabkan tidak ada pedoman yang jelas untuk melakukan perbaikan data sehingga perbaikan data tidak dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,26** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- 1) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto telah membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 namun :
 - a) Dibuat secara tahunan
 - b) Belum menggambarkan hasil kinerja yang telah/seharusnya dicapai terutama pada ketercapaian target sasaran strategis, karena terdapat perbedaan formulasi perhitungan antara yang dijelaskan pada LKjIP Tahun 2022 dengan dokumen IKU Tahun 2022
 - c) Tidak menjelaskan perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya serta belum ada analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya
 - d) Belum seluruhnya mengungkapkan penyebab penghambat/ pendukung dan upaya perbaikan kedepannya

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan **6**rtifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- e) Belum menuangkan sasaran strategis berupa meningkatkan tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah
 - f) Belum membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- 2) Efisiensi penggunaan anggaran yang disajikan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) belum menjelaskan analisis besaran efisiensi yang diperoleh dari perbaikan kegiatan/aktivitas atau dari pengurangan rincian aktivitas/biaya dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya efisiensi anggaran.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas pelaksanaan evaluasi kinerja oleh internal, mencakup pemenuhan atas rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP tahun 2022 serta capaian output dan outcome organisasi. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **20,71** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti. Namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan capaian output atas kinerja PD, hal ini ditunjukkan dengan masih ada beberapa capaian sasaran strategis/program/kegiatan yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sebagai contoh Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang menurun dari 90% di tahun 2021 menjadi 80% di tahun 2022.

6. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang **direkomendasikan** kepada Tim AKIP Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :
- a. Melakukan reviu internal atas dokumen perencanaan untuk memastikan kesesuaian dan keselarasan indikator kinerja dan target kinerja antar dokumen perencanaan.
 - b. Memastikan penetapan target kinerja yang ditetapkan didasarkan pada capaian tahun sebelumnya dan perhitungan yang logis sebagai upaya adanya perbaikan kinerja.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- c. Memastikan seluruh pegawai untuk menetapkan perencanaan kinerja berupa pembuatan SKP yang ditandatangani/disahkan oleh atasan langsung.
- d. Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas RATL (Rencana Aksi tindak lanjut) atas catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan
- e. Menyusun SOP perbaikan data jika terjadi kesalahan data dan memastikan jalannya SOP.
- f. Memastikan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak tahunan melainkan per triwulan dan memuat :
 - 1) Hasil kinerja yang telah/seharusnya dicapai terutama pada ketercapaian target sasaran strategis.
 - 2) Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya serta belum ada analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya.
 - 3) Penyebab penghambat/pendukung dan upaya perbaikan kedepannya.
 - 4) Sasaran strategis berupa meningkatkan tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah.
 - 5) Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
 - 6) Analisis besaran efisiensi diperoleh dari perbaikan kegiatan/aktivitas atau dari pengurangan rincian aktivitas/biaya.
- g. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output kinerja Perangkat Daerah.

Demikian laporan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

Mojokerto, 30 Agustus 2023

**INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



 <p>Ditandatangani secara elektronik oleh : INSPEKTUR INSPEKTORAT</p> <p>DRS. POEDJI WIDODO PEMBINA UTAMA MUBDAT/VC NIP. : 197004251990831006</p>

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS SOSIAL

Jl. R.A. Basuni No.8 Mojokerto, Kode Pos 61361
Telp / Fax. (0321) 321539 - 392503
Website : www.dinsos.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188/ /416-106/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa guna terwujudnya evaluasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Craa Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
7. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/254/HK/416-012/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023;
- b. Membantu optimalisasi pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023;

- c. Melakukan evaluasi dan memberikan usulan berkaitan dengan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kegiatan Perangkat Daerah;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO



TRY RAHARJO MURDIANTO

Tembusan :

Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SK KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188/ /416-106/2024
TANGGAL : Januari 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM UNIT	KETERANGAN
1.	Ketua	Kepala Dinas Sosial	
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Sosial	
3.	Anggota	Kepala Bidang	
		1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	
		2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	
		4. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	
		5. Semua Fungsional pada Dinas Sosial	
		6. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	
		7. UPTD Pesanggrahan PMKS Majapahit	

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO**

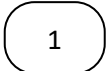
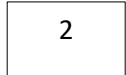
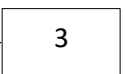



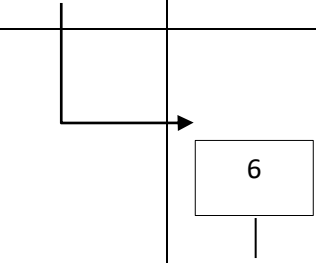
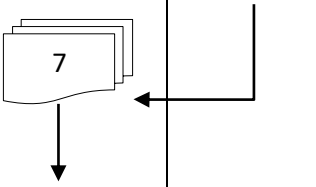
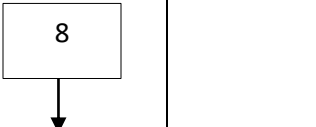
TRY RAHARJO MURDIANTO

	Nomor SOP	065/SOP/416-106/2023
	Tgl Pembuatan	23 Februari 2023
	Tgl Revisi	23 Februari 2023
	Tgl Efektif	23 Februari 2023
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS SOSIAL Jl. R.A. Basuni No. 08 Telp./Fax (0321) 3211539 - 392503 MOJOKERTO	Disahkan oleh	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO  <u>TRY RAHARIO MURDIANTO, S.STP., M.AP.</u> Pembina NIP. 19870519 200602 1 002
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA	Nama SOP	PENGUMPULAN DATA KINERJA


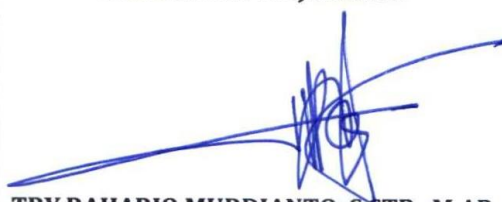
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> Mengumpulkan data realisasi capaian kinerja pada jenjang program sampai dengan sub kegiatan Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengukuran Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian Kinerja Renstra Renja LKjIP
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Pengumpulan Data Kinerja tidak diselesaikan maka evaluasi AKIP akan terhambat	Formulir Pengumpulan Data Kinerja

URAIAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			KET
		Kepala PD	Sekretaris	Tim SAKIP	Seluruh ASN Internal	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala PD memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengumpulan data kinerja					Nota Dinas	5 menit	Nota Dinas	
2.	Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran data kinerja					Nota Dinas	60 menit	Notulen Rapat	
3.	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data kinerja					Notulen Rapat	120 menit	Notulen Rapat	
4.	Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data kinerja					1. Renstra 2. Renja 3. Perjanjian Kinerja 4. IKU 5. IKI 6. LKjIP 7. Data Capaian Kinerja	1 hari	Checklist Dokumen	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			KET
		Kepala PD	Sekretaris	Tim SAKIP	Seluruh ASN Internal	Kelengkapan	Waktu	Output	
5.	Tim SAKIP menyiapkan checklist kebutuhan kinerja			5		Checklist Dokumen	1 hari	Checklist Dokumen	
6.	Checklist data kinerja didistribusikan kepada Seluruh ASN Internal untuk dicukupi					Checklist Dokumen	5 menit	Checklist Dokumen	
7.	Seluruh ASN Internal mencukupi data kinerja selanjutnya menyerahkan kepada Tim SAKIP					Checklist Dokumen	1 hari	Dokumen Data Kinerja	
8.	Tim SAKIP merekap pengumpulan data kinerja					Dokumen Data Kinerja	120 menit	Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			KET
		Kepala PD	Sekretaris	Tim SAKIP	Seluruh ASN Internal	Kelengkapan	Waktu	Output	
9.	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengumpulan data kinerja kepada Sekretaris			9		Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja	60 menit	Draft laporan hasil pengumpulan data kinerja	
10.	Sekretaris menganalisa hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan		10	TIDAK		Draft Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	120 menit	Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	
11.	Sekretaris melaporkan hasil analisa kepada Kepala PD dalam bentuk Laporan Kinerja	11	YA			Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	30 menit	Laporan Kinerja	
12.	Pengarsipan data kinerja				12	Arsip Hasil Pengumpulan Data Kinerja			

	Nomor SOP	065/SOP/416-106/2023
	Tgl Pembuatan	23 Februari 2023
	Tgl Revisi	23 Februari 2023
	Tgl Efektif	23 Februari 2023
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS SOSIAL Jl. R.A. Basuni No. 08 Telp./Fax (0321) 3211539 - 392503 MOJOKERTO	Disahkan oleh	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO  TRY RAHARIO MURDIANTO, S.STP., M.AP. Pembina NIP. 19870519 200602 1 002
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA	Nama SOP	PERBAIKAN DATA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> Mengumpulkan data realisasi capaian kinerja pada jenjang program sampai dengan sub kegiatan Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengumpulan Data Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian Kinerja Renstra Renja LKJIP
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Perbaikan Data tidak diselesaikan maka evaluasi AKIP akan terhambat	Formulir Perbaikan Data

URAIAN PROSEDUR PERBAIKAN DATA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			KET
		Kepala PD	Sekretaris	Tim SAKIP	Seluruh ASN Internal	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala PD memerintahkan Sekretaris untuk melakukan perbaikan data kinerja	1				Nota Dinas	5 menit	Nota Dinas	
2.	Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran data kinerja yang akan diperbaiki		2			Nota Dinas	60 menit	Notulen Rapat	
3.	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan perbaikan data kinerja			3		Notulen Rapat	120 menit	Notulen Rapat	
4.	Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan perbaikan data kinerja			4		1. Renstra 2. Renja 3. Perjanjian Kinerja 4. IKU 5. IKI 6. LKjIP 7. Data Capaian Kinerja	1 hari	Checklist Dokumen	
5.	Tim SAKIP menyiapkan checklist kebutuhan kinerja			5		Checklist Dokumen	1 hari	Checklist Dokumen	
6.	Checklist data kinerja didistribusikan kepada Seluruh ASN Internal untuk dicukupi				6	Checklist Dokumen	5 menit	Checklist Dokumen	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			KET
		Kepala PD	Sekretaris	Tim SAKIP	Seluruh ASN Internal	Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Seluruh ASN Internal mencukupi data kinerja selanjutnya menyerahkan kepada Tim SAKIP			7		Checklist Dokumen	1 hari	Dokumen Data Kinerja	
8.	Tim SAKIP merekap perbaikan data kinerja			8		Dokumen Data Kinerja	120 menit	Rekapitulasi hasil perbaikan data kinerja	
9.	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi perbaikan data kinerja kepada Sekretaris			9		Rekapitulasi hasil perbaikan data kinerja	60 menit	Draft laporan hasil perbaikan data kinerja	
10.	Sekretaris menganalisa hasil pengumpulan perbaikan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan		10	TIDAK		Draft Laporan Hasil Pengumpulan Perbaikan Data Kinerja	120 menit	Laporan Hasil Perbaikan Data Kinerja	
11.	Sekretaris melaporkan hasil perbaikan data kinerja kepada Kepala PD dalam bentuk Laporan Kinerja	11	YA			Laporan Hasil Perbaikan Data Kinerja	30 menit	Laporan Kinerja	
12.	Pengarsipan data kinerja				12	Arsip Hasil Perbaikan Data Kinerja			

RAPAT STAF





GIAT ASSESMENT











GIAT BANSOS BLT



GIAT BANSOS PROGRAM SEMBAKO BLT







KUNJUNGAN BUPATI DALAM GIAT BANSOS





GIAT BANSOS PROGRAM SEMBAKO BPNT





GIAT PERMAKINAN UPT PMKS PESANGGRAHAN MAJAPAHIT







**GIAT DBHCHT
(DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU)**





KUNJUNGAN BUPATI DALAM PEMBERIAN BANTUAN BAGI EKS PENDERITA KUSTA





PEMBERIAN BANTUAN BAGI EKS PENDERITA KUSTA











GIAT LKSA





LAPOR





YANG DIREUNIFIKASI KELUARGA



POSYANDU/PEMERIKSAAN RUTIN LANSIA OLEH RSI SAKINAH







ROHANI



OLAH RAGA







LAYANAN RUJUKAN



LAYANAN PENELUSURAN KELUARGA





YANG MENDAPATKAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR





FASILITASI MENDAPATKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN



KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT BANTU (DISABILITAS)





Kegiatan Inovasi Gerbang Kesos Pemberdayaan Lansia (UPT)





Kegiatan Inovasi Gerbang Kesos Penanganan ODGJ





Kegiatan Inovasi Gerbang Kesos Edukasi Rumah Aman Anak





Kegiatan Inovasi Gerbang Kesos Tagana Masuk Sekolah





Kegiatan Inovasi Gerbang Kesos Bazaar KPM PKH





Kegiatan Inovasi Gerbang Kesos Bantuan UEP Karang Taruna





**P2K2 BERSAMA IBU BUPATI DI DESA TANGUNAN KEC PURI
TANGGAL 6 SEPTEMBER 2023**





**P2K2 BERSAMA IBU BUPATI DI DESA BERATWETAN KEC GEDEG
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2023**





**P2K2 BERSAMA IBU BUPATI DI DESA MOJOWIRYO KEC KEMLAGI
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2023**



**P2K2 BERSAMA IBU BUPATI DI DESA LEBAKJABUNG KEC JATIREJO
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2023**





Bukti Dukung LKjIP 2023

https://drive.google.com/drive/folders/1D_vlNhERj177Psr4CvNSk9lSopkAxWd9?usp=sharing

<https://bit.ly/Inovasi-2023>

